



Katalog BPS : 9199007.13

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2012



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PEREKONOMIAN
SUMATERA BARAT
2012

<https://sumberps.com/id>

LAPORAN PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT 2012

Nomor Publikasi : 13550.13.04
Katalog BPS : 9199007.13
Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : x + 119

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi Laporan Perekonomian Sumatera Barat 2012 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Dalam publikasi ini akan didapatkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian Sumatera Barat berdasarkan data tahun terakhir.

Pada Laporan Perekonomian Sumatera Barat 2012 terdapat informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi, harga-harga, perdagangan luar negeri, moneter, penanaman modal, kunjungan wisatawan dan perkembangan penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Publikasi ini mungkin masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang konstruktif demi penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang akan diterima dengan senang hati.

Padang, September 2013

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

YOMIN TOFRI, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2012	5
1.3. Cakupan Laporan	6
2. Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat	7
2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	9
2.2. PDRB Menurut Penggunaan	13
2.3. PDRB Perkapita	17
2.4. Inflasi	19
2.5. Ekspor dan Impor	23
2.6. Lain-lain	25
3. Perkembangan Harga-Harga	29
3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang	31
3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2007 – 2011	38
3.3. Laju Inflasi di Pedesaan	41
4. Ekspor dan Impor	43
4.1. Ekspor	48
4.2. Impor	56
4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat	60

5. Keuangan Daerah	63
5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	65
5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70
6. Perbankan	75
6.1. Struktur Perbankan	78
6.2. Penghimpunan Dana Bank	81
6.3. Posisi Kredit Perbankan	84
7. Penduduk	95
7.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	97
7.2. Pendidikan	99
7.3. Ketenagakerjaan	101
7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	104
7.5. Kesejahteraan Masyarakat	105
8. Penutup	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2012 (persen)	10
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat Menurut Penggunaan 2011 – 2012 (persen)	16
Tabel 2.3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, Sumatera Barat 2008 – 2012	18
Tabel 2.4. Laju Inflasi Kota Padang, 2005 – 2012 (persen)	19
Tabel 2.5. Inflasi Bulanan Kota Padang, 2009 – 2012 (persen)	22
Tabel 2.6. Perkembangan Ekspor dan Impor Sumatera Barat 2008- 2012 (jutaan US \$)	25
Tabel 2.7. Rencana investasi PMDN dan PMA yang telah Mendapat Persetujuan Tetap menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2011 – 2012	27
Tabel 2.8. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sumatera Barat, 2008 – 2012 (orang)	28
Tabel 3.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, Tahun 2008 – 2012 (Tahun Dasar 2002=100)	32
Tabel 3.2. Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dan Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2012 (2007=100)	35
Tabel 3.3. Laju Inflasi Kota Padang 2008 – 2012	37
Tabel 3.4. Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat, 2008 – 2012 (2007 = 100)	39
Tabel 4.1. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Komoditi, 2011 – 2012	51
Tabel 4.2. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2011 – 2012.....	55

Tabel 4.3. Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2003 – 2012	57
Tabel 4.4. Volume Impor Menurut Barang 1 Digit STIC, 2008 – 2012 (ton)	59
Tabel 4.5. Nilai Impor Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC, 2008 – 2012 (000 US \$)	59
Tabel 4.6. Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2008-2012 (000 US \$)	61
Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2012.....	69
Tabel 5.2. Ringkasan APBD Kabupaten/Kota menurut Sumber Penerimaan Tahun 2012 (rupiah)	71
Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat, 2011 (ribuan rupiah)	74
Tabel 6.1. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2010-2012 .	79
Tabel 6.2. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Sumatera Barat, 2010 – 2012 (jutaan rupiah)	83
Tabel 6.3. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing menurut Jenis Penggunaan di Sumatera Barat, 2010 – 2012 (jutaan rupiah)	86
Tabel 6.4. Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat, 2010 – 2012 (jutaan rupiah)	88
Tabel 6.5. Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2011 – 2012 (jutaan rupiah)	89
Tabel 6.6. Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2010 – 2012 (jutaan rupiah)	91

Tabel 7.1. Perkembangan Penduduk Sumatera Barat, 2008 – 2012	97
Tabel 7.2. Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2012 (000)	98
Tabel 7.3. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2010 – 2012 (%)	100
Tabel 7.4. Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 – 2012	102
Tabel 7.5. Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 – 2012 (000)	103
Tabel 7.6. Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Sumatera Barat Tahun 2010 dan 2012	104
Tabel 7.7. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Suma- tera Barat, Tahun 2011 dan 2012	106
Tabel 7.8. Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2001-2012	108
Tabel 7.9. Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2008-2012 (rupiah/kapita/bulan)	111
Tabel 7.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2008 – 2012	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat, 2011 – 2012	12
Gambar 2.2. Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, 2011 – 2012	13
Gambar 2.3. Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat Menurut Penggunaan, 2011 – 2012 (persen)	17
Gambar 4.1. Perkembangan Nilai Ekspor Utama Hasil Pertanian, Industri, dan Pertambangan di Sumatera Barat, 2011 – 2012	52
Gambar 4.2. Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2011 – 2012 (000 US \$)	54
Gambar 4.3. Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2008 – 2012 (000 US \$).....	61

1

PENDAHULUAN

- ☞ **LATAR BELAKANG**
- ☞ **GAMBARAN EKONOMI
SUMATERA BARAT TAHUN
2012**
- ☞ **CAKUPAN LAPORAN**

1.1. Latar Belakang

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik selama tahun 2012 terus mengalami perbaikan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat tinggi, neraca pembayaran yang mengalami surplus cukup besar, serta kinerja sektor keuangan yang semakin membaik. Selain didukung oleh faktor fundamental yang membaik tersebut juga diiringi oleh terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan dengan volatilitas yang cukup rendah. Di sisi harga, inflasi pada tahun 2012 masih cukup terjaga, sehingga inflasi tercatat lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai

impor. Impor meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan sehingga memacu perekonomian. Di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang ekspor serta dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan. Namun kondisi perekonomian dunia diperkirakan masih akan terus melambat. Hal ini diperkirakan akan menghambat kinerja ekspor Indonesia.

Perkembangan perekonomian yang diawali dengan tingginya optimisme masyarakat berhasil meraih kembali stabilitas makro ekonomi setelah gejolak harga minyak pada akhir tahun 2005 yang dampaknya terasa hingga pertengahan tahun 2006. Optimisme itu dilandasi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan makro ekonomi. Kebijakan makro ekonomi ini didukung oleh keselarasan arah kebijakan moneter yang konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi dan kebijakan fiskal yang berkomitmen kuat terhadap kesinambungan fiskal.

Pada tahun 2012 perekonomian global kembali mengalami keterpurukan. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi di beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang memburuk dan belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Krisis ini juga menjangar ke kawasan Asia sehingga permintaan akan bahan baku dari Indonesia ke negara-negara seperti India dan China juga berkurang. Demikian juga kinerja ekspor impor semakin memburuk sejalan dengan permintaan global yang semakin berkurang. Walaupun demikian konsumsi rumahtangga tetap meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sehingga tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian di tengah kinerja perekonomian yang semakin membaik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang terdiri dari dasarnya aliran masuk modal asing, besarnya eksese likuiditas perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai kendala di sektor riil.

Menurut gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution perekonomian Indonesia di tahun 2013-2014 diperkirakan akan tumbuh 6,3-6,8 persen dan 6,7-7,2 persen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat, sementara ekspor diperkirakan akan membaik.

Jika target bank sentral mencapai level tersebut, maka target itu sedikit lebih tinggi di atas target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah yang berada di level 6,5 persen.

Selain didukung perkembangan ekonomi global dan domestik yang membaik, ekonomi Indonesia tahun depan juga disokong konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan sektor eksternal, dan peningkatan investasi. Di samping itu makin membaiknya harga-harga komoditi di dunia diperkirakan akan membawa pengaruh yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis global yang melanda Eropa dan Amerika diprediksi masih akan

menguntungkan Indonesia di tahun 2012.

Secara keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar pada tahun 2012 mencapai 6,35 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya 6,25 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumbar secara umum masih ditopang oleh tingginya konsumsi rumahtangga disamping realisasi belanja konsumsi pemerintah.

1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2012

Menurut Darmin, daya tahan ekonomi selama ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, sehingga akan mampu memperkuat permintaan domestik. Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat mampu menahan dampak turunnya pertumbuhan ekspor terutama mulai paruh kedua 2012.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat tahun 2012 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Adanya bencana gempa yang melanda Sumatera Barat di tahun 2009

khususnya di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman sudah berkurang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perkembangan perekonomian tersebut makin meningkat walaupun masih lebih rendah daripada pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 tercatat sebesar 43,91 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi 6,35 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 6,25 persen. Pertumbuhan ini juga ditopang karena masuknya dana rehab rekon (RR) sebesar 2 triliun rupiah. Hal ini berlanjut sampai dengan tahun 2012 yang dipastikan akan meningkat tinggi karena jumlah dana RR yang masuk dua kali lipat. Dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku sebesar 110,10 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Nilai PDRB tahun 2011 atas dasar harga konstan sebesar 41,29 triliun rupiah dan nilai PDRB atas

dasar berlaku sebesar 98,96 triliun rupiah.

Seperti halnya dengan tahun 2011, pada tahun 2012 seluruh sektor ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan sektor yang merupakan kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor pertanian.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 sangat didukung oleh laju inflasi yang justru mengalami penurunan. Laju inflasi yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2012 lebih rendah dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011, inflasi di Kota Padang tercatat sebesar 5,37 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding inflasi yang terjadi di tahun 2012 yang tercatat sebesar 4,16 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nasional, inflasi di Kota Padang ini juga lebih rendah. Angka inflasi nasional pada tahun 2012 mencapai 4,30 persen.

1.3. Cakupan Laporan

Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2012 menyajikan

informasi perkembangan indikator-indikator perekonomian yang menggambarkan perkembangan kemajuan ekonomi secara umum. Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat disajikan atas 7 bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan kondisi perekonomian secara umum. Dalam Bab II terdapat perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor dan lain-lain. Bab III menampilkan perkembangan harga-harga yang meliputi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi di Kota Padang. Sedangkan mengenai perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor serta neraca perdagangan ditampilkan pada Bab IV. Bab V menyajikan perkembangan keuangan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data Perbankan yang meliputi struktur perbankan, penghimpunan dana dan posisi kredit perbankan terdapat pada Bab VI. Sedangkan pada Bab VII diuraikan mengenai perkembangan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir Bab VIII adalah Penutup.

2

TINJAUAN EKONOMI SUMATERA BARAT

- 👉 **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**
- 👉 **PDRB MENURUT PENGGUNAAN**
- 👉 **PDRB PERKAPITA**
- 👉 **INFLASI**
- 👉 **EKSPOR DAN IMPOR**
- 👉 **LAIN-LAIN**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit.

Penghitungan PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1. PDRB Menurut Lapangan

Usaha

PDRB menurut lapangan usaha merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

PDRB atas lapangan usaha ini dirinci atas sembilan sektor, yaitu : sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat di tahun 2012 sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan PDRB yang tercipta yakni sebesar 6,35 persen. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat hanya sebesar 6,25 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 6,23 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut sedikit di bawah target pemerintah daerah, yaitu sebesar 6,50 persen. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional juga masih di bawah prediksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 6,5 persen.

Bila dilihat menurut lapangan usaha, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 terjadi pada semua sektor. Kecepatan masing-masing sektor untuk tumbuh sedikit berbeda dari tahun 2011. Pada tahun 2011 sektor yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor

bangunan (8,96 persen). Namun di tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami laju pertumbuhan tercepat, dimana pertumbuhan sektor tersebut mencapai 9,03 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya (8,84 persen).

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2011 – 2012 (persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi PDRB ²⁾	
	2011 ^{**)}	2012 ^{**)}	2011 ^{**)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	3,79	4,07	23,66	23,01
2. Pertambangan dan Penggalian	3,75	4,41	2,97	2,90
3. Industri Pengolahan	4,65	4,04	11,39	11,15
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,87	4,91	0,98	0,95
5. Bangunan	8,96	7,07	6,58	6,68
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,89	7,50	18,02	18,45
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,84	9,03	15,62	15,89
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,64	6,35	4,52	4,52
9. Jasa-jasa	8,17	7,63	16,26	16,45
P D R B	6,25	6.35	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka diperbaiki

***) Angka sementara

1) Atas Dasar Harga Konstan 2000

2) Atas Dasar Harga Berlaku

Selain sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa juga memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2012. Sektor jasa-jasa memiliki laju pertumbuhan sebesar 7,63 persen namun menurun dibanding tahun 2011 yang tercatat memiliki pertumbuhan 8,17 persen. Sektor lainnya yang tumbuh cukup tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini mengalami pertumbuhan 7,50 persen, dan ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 6,89 persen.

Pada tahun 2012 terdapat tiga sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan, yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, serta sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan pertumbuhannya dari 4,65 persen di tahun 2011 menjadi 4,04 persen di tahun 2012. Sedangkan bangunan berkurang pertumbuhannya dari 8,96 persen di tahun 2011 menjadi 7,07 persen di tahun 2012. Penurunan laju di sektor bangunan ini seiring dengan makin berkurangnya proses rehabilitasi infrastruktur di Sumatera

Barat pasca gempa tahun 2009 yang lalu. Selanjutnya sektor jasa-jasa, walaupun memiliki laju pertumbuhan yang cukup besar, juga mengalami penurunan dibanding tahun 2011.

Sampai tahun 2012 sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dan yang utama di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB di tahun 2012 yang mencapai 23,01 persen. Kontribusi sektor pertanian sedikit menurun dibanding tahun 2011 yang berada pada angka 23,66 persen. Namun walaupun mengalami penurunan dalam distribusi, sektor pertanian masih mengalami peningkatan laju pertumbuhan, yaitu dari 3,79 persen di tahun 2011 menjadi 4,07 persen di tahun 2012.

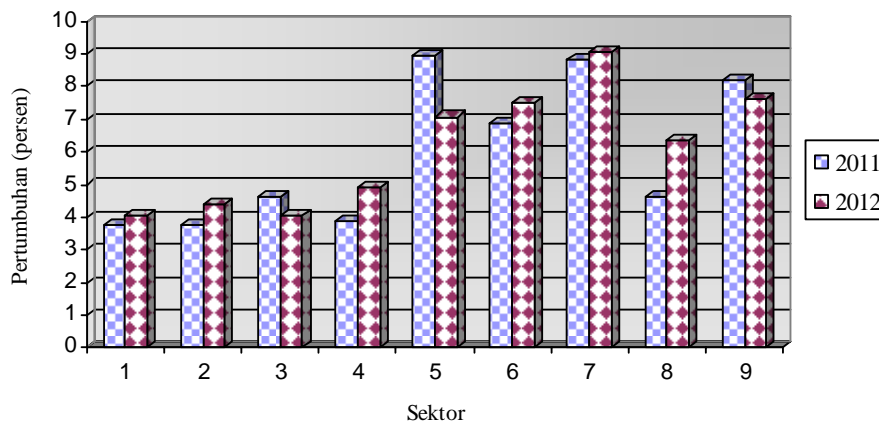
Sektor berikutnya yang mempunyai andil yang juga besar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2011 sebesar 18,02 persen PDRB Sumatera Barat berasal dari sektor ini, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 18,45 persen. Suku Minang yang merupakan etnis

mayoritas di Provinsi Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai saudagar yang tangguh, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Dan hasilnya terlihat dari cukup besarnya sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat. Peningkatan peranannya dalam pembentukan PDRB sektor ini juga seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan pada sektor tersebut sehingga sektor ini masih tetap merupakan sektor yang punya peranan penting di Sumatera Barat.

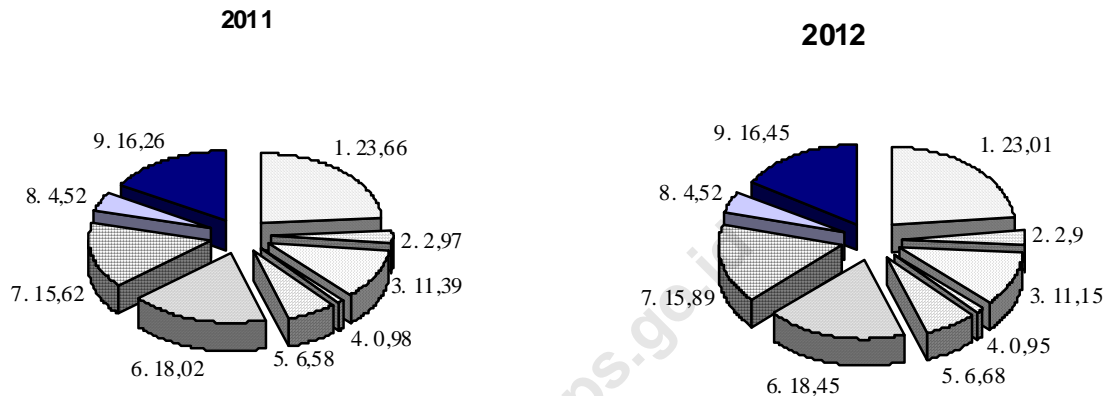
Sementara itu sektor industri pengolahan nampaknya masih belum

memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat. Pada tahun 2011 sektor ini menyumbang 11,39 persen terhadap PDRB Sumatera Barat dan pada tahun 2012 sedikit berkurang menjadi 11,15 persen. Namun sumbangan sektor tersebut masih lebih baik daripada beberapa sektor lainnya. Sektor yang paling kecil peranannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang hanya memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat sebesar 0,93 dan 0,95 persen di tahun 2011 dan 2012.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat, 2011-2012



Gambar 2.2
Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2011– 2012



Keterangan

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Pertanian | 6. Perdagangan, hotel dan restoran |
| 2. Pertambangan dan penggalian | 7. Pengangkutan dan komunikasi |
| 3. Industri | 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan |
| 4. Listrik, gas, dan air bersih | 9. jasa-jasa |
| 5. Bangunan | |

2.2. PDRB Menurut Penggunaan

PDRB menurut penggunaan merupakan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga termasuk lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor

bersih (ekspor-impor) dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2011, laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat ditinjau dari sisi permintaan yang paling besar adalah perubahan stok yaitu sebesar 62,22 persen. Pengertian stok disini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal

dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, barang-barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Laju pertumbuhan perubahan stok ini jauh lebih cepat dibanding komponen lainnya, dimana pada urutan kedua terdapat impor barang-barang dan jasa-jasa dengan laju pertumbuhan sebesar 14,96 persen. Di tahun 2011 ini komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor barang-barang dan jasa-jasa, dan pembentukan modal tetap bruto juga memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun tersebut laju pertumbuhannya masing-masingnya mencapai 11,77; 11,68 dan 10,82 persen. Komponen yang paling kecil laju pertumbuhannya adalah pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba. Pada tahun 2011 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,35 persen.

Namun pada tahun 2012 laju pertumbuhan terbesar justru terjadi pada komponen impor barang-barang dan jasa-jasa dengan laju sebesar 7,34

persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah, yang masing-masingnya mempunyai laju pertumbuhan sebesar 7,17 dan 6,94 persen. Sedangkan komponen yang memiliki laju pertumbuhan terkecil di tahun tersebut adalah perubahan stok yang memiliki laju pertumbuhan -53,37 persen. Selanjutnya ekspor barang-barang dan jasa-jasa juga memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 2,54 persen. Secara umum laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut penggunaan pada tiap komponen di tahun 2012 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2011, hanya pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba yang sedikit lebih tinggi.

Dilihat dari distribusi PDRB menurut penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga masih merupakan yang utama dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat menurut penggunaan. Pada tahun 2012 komponen ini memberikan andil yang

paling besar, yaitu sebesar 52,86 persen. Dibanding tahun 2011 terjadi sedikit penurunan, dimana andil pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah 52,98 persen. Pengeluaran konsumsi rumahtangga ini terdiri atas semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau afkiran.

Komponen yang mempunyai distribusi yang juga cukup besar setelah pengeluaran konsumsi rumahtangga di tahun 2012 adalah ekspor barang dan jasa dimana pada tahun itu andilnya mencapai 27,95 persen. Distribusi PDRB komponen ekspor barang dan jasa ini berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tercatat sebesar 29,24 persen.

Sementara itu distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2012 sedikit meningkat dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi

pemerintah adalah 14,40 persen, naik menjadi 14,73 persen di tahun 2012. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini merupakan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, tidak termasuk atau dikurangi dengan hasil penjualan (penerimaan) dari produksi barang dan jasa (output pasar) yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah (yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah) tetapi dikonsumsi oleh masyarakat (bukan pemerintah). Sedangkan distribusi paling rendah terdapat pada komponen perubahan stok, baik pada tahun 2011 maupun 2012 dengan andil masing-masingnya sebesar -2,95 dan -1,36 persen.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB
Provinsi Sumatera Barat Menurut Penggunaan
2011 - 2012 (Persen)

Komponen	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi ²⁾	
	2011*	2012**	2011*	2012**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,52	4,56	52,98	52,86
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3,35	3,69	0,89	0,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,77	6,94	14,40	14,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,82	7,17	20,25	20,21
5. Perubahan Stok.	62,22	-53,37	-2,95	-1,36
6. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	11,68	2,54	29,24	27,95
7. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	14,96	7,34	14,81	15,28
PDRB	6,22	6,35	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

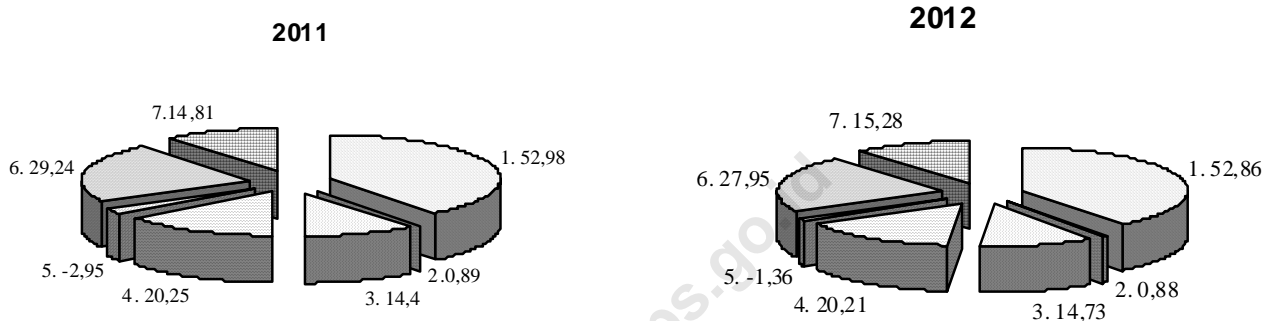
Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹⁾ ADHK 2000

²⁾ ADHB

Gambar 2.3
Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat,
Menurut Penggunaan 2011 – 2012 (Persen)



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Konsumsi Rumah tangga | 5. Perubahan Stok |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 6. Ekspor barang-barang dan jasa |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 7. Dikurangi impor barang-barang dan jasa |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | |

2.3 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dari penghitungan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai

PDRB per kepala atau per satu penduduk.

Pada tahun 2012 tercatat PDRB per kapita menurut harga berlaku sebesar 22.208.586,23 rupiah. Dibanding dengan kondisi tahun 2011, telah terjadi peningkatan sebesar 10,07 persen, dimana PDRB per kapita pada tahun 2011 adalah sebesar 20.176.995,94 rupiah.

Apabila dilihat selama lima tahun terakhir ini, PDRB per kapita Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Namun walaupun meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut dari

tahun 2009 kenaikan PDRB per kapita adalah 6,96 persen. Namun di tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 12,06 persen. Di tahun 2011 PDRB per kapita kembali meningkat menjadi 12,56 persen.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Barat 2008 – 2012.

Uraian	Tahun	Nilai Nominal (rupiah)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita	2008	14 955 228,94	-
	2009	15 996 690,68	6,96
	2010	17 926 057,16	12,06
	2011 *)	20 176 995,94	12,56
	2012 **)	22 208 586,23	10,07
Pendapatan Regional Perkapita ¹⁾	2008	13 724 586,86	-
	2009	14 663 662,45	6,84
	2010	16 407 478,33	11,89
	2011*)	18 494 812,97	12,72
	2012**))	20 280 231,29	9,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Catatan : 1) Tidak termasuk transfer neto yaitu selisih pendapatan faktor produksi milik penduduk Sumatera Barat di luar wilayah dengan pendapatan faktor produksi yang dimiliki bukan penduduk Sumatera Barat.

Pendapatan regional per kapita diperoleh dari PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto serta ditambah transfer netto, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pada tahun 2012 pendapatan regional per kapita Sumatera Barat adalah 20.280.231,29 rupiah, atau meningkat 9,65 persen dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 tersebut tercatat sebesar 18.494.812,97 rupiah.

2.3. Inflasi

Angka inflasi di Kota Padang pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,16 persen. Dibanding angka inflasi nasional, angka inflasi Kota Padang sedikit lebih rendah, dimana angka inflasi nasional adalah sebesar 4,30 persen. Angka inflasi nasional pada tahun tersebut masih berada dibawah target inflasi tahun 2012, sedangkan inflasi di Kota Padang juga lebih rendah dari target inflasi 2012 yang ditetapkan pemerintah sebesar 7,00-8,00 persen.

Inflasi Kota Padang di tahun 2012 tersebut juga lebih rendah daripada tahun sebelumnya, dimana

pada tahun 2011 tercatat sebesar 5,37 persen. Berdasarkan pada ilmu ekonomi, inflasi di dua tahun tersebut masih tergolong inflasi ringan. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10 persen setahun.

Tabel 2.4.
Laju Inflasi Kota Padang 2005-2012
(persen)

Tahun	Inflasi
(1)	(2)
2005	20,47
2006	8,05
2007	6,90
2008	12,68
2009	2,05
2010	7,84
2011	5,37
2012	4,16

Penyebab rendahnya tekanan inflasi di tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh minimnya gejolak harga pangan. Inflasi rendah merupakan dampak yang muncul seiring dengan melemahnya harga komoditas, termasuk pangan, yang dipicu terutama oleh krisis Eropa. Tren inflasi rendah kemungkinan masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Namun, pemerintah harus tetap

waspada tekanan inflasi akibat masalah suplai pangan. Inflasi nasional tahun 2011 yang cukup terjaga diyakini karena tekanan inflasi inti yang masih dapat dikendalikan. Selain itu, rendahnya inflasi bahan pangan dan minimnya inflasi *administered prices* juga mendukung rendahnya inflasi 2011.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, telah terjadi penurunan tajam inflasi nasional dibanding tahun 2010 yang tercatat sebesar 6,96 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan BI sebesar lima plus minus satu. Menurut Darmin, hal tersebut karena terkendalinya inflasi inti. Inflasi inti yang stabil, didukung oleh kebijakan moneter dan nilai tukar dalam mengendalikan permintaan, tekanan inflasi dari barang impor, serta ekspektasi inflasi. Di sisi lain, rendahnya inflasi bahan pangan juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran, distribusi, serta stabilisasi harga pangan. Sementara itu, kebijakan fiskal terkait subsidi energi berdampak pada minimnya inflasi *administered prices*. Sinergi

kebijakan BI dan Pemerintah dalam meredam inflasi tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi yang semakin baik, yang antara lain dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ada tiga penyebab yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya inflasi, yaitu pertama *demand full inflation* karena besarnya permintaan yang biasanya terjadi pada hari-hari Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kedua, *cost push inflation* yang terjadi karena adanya kelangkaan produksi dan kenaikan harga input produksi. Ketiga, *imported inflation* yang berasal dari luar negeri. Seperti barang yang diimpor, terjadinya kenaikan sehingga barang yang ada di dalam negeri juga akan mengalami peningkatan. Kalau tidak ada gangguan dari *cost push inflation* dan *imported inflation*, maka tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi kenaikannya.

Selama periode tahun 2005-2012 inflasi di Kota Padang berada pada kisaran yang fluktuatif. Inflasi tertinggi tercatat di tahun 2005. yaitu sebesar 20,47 persen. Inflasi yang

tinggi di tahun tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sehingga harga BBM menjadi naik. Kenaikan harga BBM ini sangat mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, dan secara otomatis inflasi juga menjadi tinggi. Dari fluktuasi inflasi yang terjadi selama ini ternyata kebijakan pemerintah dalam penetapan harga barang yang dikendalikannya sangat menentukan kenaikan atau penurunan inflasi. Sebaliknya penurunan angka inflasi seperti yang terjadi pada tahun 2009 juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah, antara lain melakukan penurunan harga BBM sebanyak tiga kali yang merupakan tindak lanjut dari turunnya harga minyak dunia.

Inflasi bulanan di Kota Padang juga bergerak pada angka yang fluktuatif. Ada bulan yang mengalami inflasi namun ada juga yang mengalami deflasi. Pada tahun 2012 didapatkan sembilan bulan yang

mengalami inflasi dan tiga bulan yang mengalami deflasi. Deflasi di tahun tersebut terjadi pada bulan Februari, Mei dan November yang masing-masingnya sebesar -0,90, -0,43 dan -0,63 persen. Deflasi ini terjadi karena adanya penurunan harga yang cukup tajam pada beberapa kelompok pengeluaran tertentu, misalnya pada bulan Februari terjadi penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Demikian juga dengan bulan-bulan lainnya mengalami deflasi karena adanya penurunan harga komoditas tertentu.

Deflasi nasional dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertama, deflasi nasional dapat menjadi faktor penahan untuk kenaikan suku bunga nasional. Selain itu, deflasi dapat menurunkan biaya pembelian bahan baku untuk industri pengolahan. Namun, deflasi juga dapat menaikkan konsumsi masyarakat karena adanya dorongan harga yang lebih murah.

Tabel 2.5.

Inflasi Bulanan Kota Padang, 2009-2012 (persen)

Bulan	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	-0,08	1,59	3,70	0,56
Februari	0,68	0,17	0,44	-0,90
Maret	-0,56	-0,73	-2,59	0,43
April	-0,76	0,27	-1,07	0,46
Mei	-0,39	0,45	0,08	-0,43
Juni	-0,19	1,58	0,11	1,22
Juli	0,75	1,49	0,77	0,13
Agustus	0,45	-0,37	1,13	1,08
September	1,56	-0,37	1,24	0,54
Oktober	1,78	0,06	0,63	0,71
November	-0,53	1,38	0,46	-0,63
Desember	-0,65	2,00	0,48	0,94

Sumber : Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi Kota Padang 2003 – 2012

Kondisi sebaliknya akan terjadi inflasi jika terjadi kenaikan beberapa harga barang dan jasa. Selama 2012 inflasi di Kota Padang menunjukkan tren yang tidak terlalu berbeda antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Inflasi bulanan di tahun 2012 tertinggi di Kota Padang terjadi di bulan Juni yang tercatat sebesar 1,22 persen, karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Terjadinya inflasi di bulan Juni merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya, karena di bulan

tersebut merupakan tahun ajaran baru sekolah. Beberapa kelompok pengeluaran yang menyebabkan inflasi antara lain kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar persen, kelompok sandang, kelompok kesehatan, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami penurunan.

Fenomena inflasi yang cukup tinggi di bulan Ramadhan dan terus berlanjut di hari raya merupakan hal rutin terjadi setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari angka inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2012 yang mencapai 1,08 persen. Tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh semakin besarnya konsumsi masyarakat baik untuk makanan, sandang, ataupun perumahan. Demikian juga di bulan September terjadi inflasi sebesar 0,54 persen dan angka ini merupakan inflasi tertinggi diantara 66 kota setelah Pangkal Pinang (0,74 persen). #

2.4. Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor memperlihatkan kondisi yang sangat kondusif sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, namun pada tahun 2012 kembali menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh gejolak perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor Sumatera Barat yang menyebabkan penurunan permintaan. Tidak menentunya harga komoditi ekspor di pasar dunia juga ditengarai menjadi penyebab

melemahnya kinerja ekspor tersebut. Sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diwaspadai guna menunjang kinerja ekspor yang lebih baik dan agar dapat menghasilkan cadangan devisa yang masih sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan ekonomi. Permasalahan yang mendesak untuk dipikirkan oleh pemerintah yaitu semakin tajamnya persaingan global dalam perdagangan internasional dan semakin ketatnya standar kualitas beberapa komoditi ekspor Indonesia yang ditetapkan di beberapa negara mitra dagang. Untuk itu pemerintah tetap berupaya untuk merumuskan kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi guna menunjang dan meningkatkan kelancaran arus barang dengan membuat peraturan yang mempermudah para eksportir dalam mengurus birokrasi kepabeanan yang selama ini mempersulit prosedur komoditi ekspor ke luar negeri dan juga menjadi fasilitator dalam mencari pasar internasional bagi produk dalam negeri.

Selain kebijakan ekspor, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dibidang impor yaitu dengan mengupayakan untuk tetap menunjang serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Untuk mendorong kegiatan industri pengolahan, pemerintah mulai mengatur tata cara impor mesin dan peralatan mesin bukan baru dengan menetapkan kriteria mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor dan ketentuan mengenai uji kelaikan barang impor tersebut. Disamping itu kebijakan impor juga ditujukan untuk tetap menjaga tersedianya kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatkan pendayagunaan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Sampai tahun 2008 perkembangan ekspor dan impor Sumatera Barat menunjukkan hal yang membesarkan hati. Setiap tahun nilai ekspor dan impor selalu mengalami

peningkatan dan nilai ekspor selalu lebih besar dari pada impor.

Namun pada tahun 2009 nilai ekspor dan impor Sumatera Barat menurun secara signifikan. Ekspor Sumatera Barat di tahun tersebut tercatat sebesar 1.344,26 juta US \$, sedangkan impor adalah sebesar 346,25 juta US \$. Bila dibanding dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor di tahun 2009 tersebut telah mengalami penurunan sebesar 43,63 persen, sedangkan impor berkurang 27,33 persen. Namun di tahun 2010 kinerja ekspor impor mengalami perbaikan yang menggembirakan dan masih terus berlanjut sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 kinerja ekspor impor Sumatera Barat sudah makin bangkit kembali. Baik ekspor maupun impor mengalami peningkatan yang signifikan. Ekspor tahun itu telah mencapai 3,03 milyar US \$, sedangkan impor tercatat sebesar 1,08 milyar US \$.

Tabel 2.6
Perkembangan Ekspor – Impor
Sumatera Barat 2008-2012 (Jutaan US \$)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor	2 384,57	1 344,26	2 214,77	3 031,82	2 363,58
Impor	476,47	346,25	751,38	1 076,74	1 242,93

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Selama tahun 2012 perkembangan kinerja ekspor impor Sumatera Barat sedikit mengalami penurunan yang kurang mengembirakan. Nilai ekspor mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 2,36 milyar US \$, sedangkan impor justru meningkat menjadi 1,24 milyar US \$. Penurunan ekspor ini terjadi karena tidak menentunya kondisi perekonomian negara tujuan ekspor sehingga permintaan akan komoditi yang merupakan produk unggulan Sumatera Barat juga berkurang.

2.5. Lain-lain

Minat investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Sumate-

ra Barat pada tahun 2012 makin menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan keinginan dalam menanamkan investasi terlihat pada kedua macam jenis pemodal, namun peningkatan investor asing dalam menanamkan modalnya bertambah sangat signifikan.

Persetujuan investasi yang diberikan oleh BKPM/BKPMD kepada calon investor dalam negeri pada tahun 2011 adalah senilai 1,38 triliun rupiah. Pada tahun 2012 investasi yang termasuk PMDN ini meningkat menjadi 1,91 triliun rupiah. Sedangkan untuk nilai rencana investasi asing di tahun 2011 tercatat sebesar 75,44 juta US \$, di tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 281,31 jutar US \$.

Sektor yang telah mendapat persetujuan tetap dalam rencana investasi oleh PMDN di Sumatera Barat pada tahun 2012 terdiri dari tujuh sektor dan hanya ada dua sektor yang tidak termasuk yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa serta sektor jasa-jasa. Sedangkan rencana investasi oleh PMA yang telah disetujui juga terbagi atas tujuh sektor yaitu selain dari sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa.

Sektor yang paling besar rencana nilai investasi dari PMDN pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun ini telah

disetujui investasi sebesar 1.16 triliun rupiah. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011, dimana investor dalam negeri lebih banyak berminat pada sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai investasi yang telah disetujui sebesar 591,00 milyar rupiah.

Selanjutnya minat investor luar negeri menginvestasikan modalnya di tahun 2012 masih sama dengan tahun 2011 yaitu lebih dominan ke sektor pertambangan dan penggalian, yakni mencapai 94,64 juta US \$, meningkat sangat signifikan dari 56,83 juta US \$ pada tahun 2011.

Tabel 2.7

Rencana Investasi PMDN dan PMA yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2011-2012

Lapangan Usaha	2011		2012	
	PMDN (juta rupiah)	PMA*) (ribu US\$)	PMDN (juta rupiah)	PMA (ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian	16 340,50	659,00	388 500,00	-
2 Pertambangan dan Pengalihan	591 000,00	56 833,72	4 575,00	94 643,02
3 Industri Pengolahan	386 091,69	840,00	1 162 273,52	62 120,03
4, Listrik, Gas dan Air Bersih	392 045,36	-	260 000,00	17 723,24
5 Bangunan	-	6 050,00	3 000,00	2 000,00
6 Perdagangan, hotel dan Restoran	-	6 462,39	1 570,00	11 794,75
7 Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	90 000,00	5 911,31
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa	-	-	0,00	-
9 Jasa-Jasa	-	4 600,00	0,00	87 122,22
Jumlah	1 385 477,55	75 445,11	1 909 918,52	281 314,57

Sumber : BKPM Sumatera Barat

Keterangan : *) Data diperbaiki

Pada tahun 2008 wisatawan yang terdiri dari wisatawan mancanegara dan domestik tercatat sebanyak 6.767.276 orang, sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi sebanyak 7.460.533 orang. Namun kondisi tersebut tidak berlanjut pada tahun 2010. Tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat pasca

gempa Padang dan tsunami Mentawai menurun secara drastis. Pada tahun 2010 tercatat wisatawan sebanyak 4.602.692 orang atau secara makro jumlah wisatawan menurun 38,31 persen pada tahun 2010 jika dibandingkan tahun 2009.

Umumnya wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat

merupakan wisatawan domestik. Seiring dengan penurunan jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, pada tahun 2010 wisatawan domestik juga berkurang jumlahnya dibanding tahun 2009. Walaupun pada beberapa tahun sebelumnya jumlah wisatawan domestik mengalami peningkatan dan mencapai jumlah 7.412.910 orang pada tahun 2009, di tahun 2010 turun menjadi 4.575.601 orang, atau berkurang 38,28 persen dibanding tahun sebelumnya.

jumlahnya juga meningkat sampai dengan tahun 2009, namun berkurang di tahun 2010. Pada tahun 2008 wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat tercatat berjumlah 37.762 orang. Sedangkan di tahun 2009 mencapai 47.623 orang. Dan di tahun 2010 berkurang secara signifikan menjadi 27.091 orang atau turun 43,11 persen. Selanjutnya pada dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, yaitu masing-masingnya berjumlah 29.638 dan 36.953 orang.

Kondisi yang sama ditemui pada wisatawan mancanegara yang

Tabel 2.8.

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sumatera Barat, 2008 – 2012 (orang)

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	37 762	6 729 514	6 767 276
2009	47 623	7 412 910	7 460 533
2010	27 091	4 575 601	4 602 692
2011	29 638	*)	*)
2012	36 953	*)	*)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Data tidak tersedia

3

PERKEMBANGAN HARGA-HARGA

- 👉 **PERKEMBANGAN IHK DAN LAJU INFLASI**
- 👉 **HARGA PRODUSEN DI TINGKAT PETANI DAN NILAI TUKAR PETANI**
- 👉 **LAJU INFLASI DI PEDESAAN**

Perkembangan harga-harga yang terjadi dapat dilihat dari angka inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sedangkan secara luas inflasi dapat juga berarti melemahnya nilai mata uang yang disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar untuk membeli barang-barang di pasaran.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama inflasi terjadi karena naiknya permintaan (*demand full inflation*), dan yang kedua inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*) serta yang ketiga inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang-barang di luar negeri sehingga mempengaruhi harga-harga barang di dalam negeri (*imported inflation*).

Di bidang harga, pemerintah secara bertahap melanjutkan penyesuaian harga sejumlah barang pada harga pasarnya. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan antara lain diarahkan untuk

mempertahankan daya beli sebagian masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang turut mempengaruhi laju inflasi seperti adanya pengurangan subsidi BBM, kenaikan harga LPG, kenaikan harga air PAM dan kebijakan lainnya seperti menaikkan tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon ataupun kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) juga dapat memacu laju inflasi.

3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang

Penghitungan indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan dasar penghitungan inflasi diperoleh dari hasil pengolahan data harga konsumen (HK). Pemantauan data HK meliputi 350 jenis barang dan jasa hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penghitungan persentase perubahan IHK/IBP dalam satu tahun menggunakan metode point to point, yang sebelumnya menggunakan metode kumulatif bulanan.

Tabel. 3.1
Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, tahun 2008 – 2012
Tahun Dasar 2002 = 100
2007 = 100

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	161,68	115,94	120,29	132,42	135,31
Februari	164,90	116,73	120,50	133,00	134,09
Maret	167,25	116,08	119,62	129,55	134,67
April	167,40	115,20	119,94	128,16	135,29
Mei	168,30	114,75	120,59	128,26	134,71
Juni	111,41	114,53	122,50	128,40	136,35
Juli	113,09	115,39	124,33	129,39	136,53
Agustus	113,26	115,91	123,87	130,85	138,01
September	113,68	117,72	123,41	132,47	138,75
Oktober	114,81	119,82	123,48	133,30	139,73
November	115,79	119,19	125,19	133,91	138,85
Desember	116,03	118,41	127,69	134,55	140,15

Keterangan : Mulai Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007 = 100

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2003 -2012, BPS Prov. Sumatera Barat

Dalam penghitungan IHK, barang dan jasa dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga serta kelompok transportasi dan komunikasi

Hasil penghitungan IHK umum di Kota Padang sampai saat ini menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Namun dengan

perubahan tahun dasar IHK dari tahun 2002 menjadi tahun 2007 yang dimulai bulan Juni tahun 2008, maka nilai IHK mulai bulan Juni tersebut menjadi lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2008 tercatat angka IHK sebesar 111,41 yang berarti bila dibandingkan dengan tahun dasar, perubahan IHK ini sebetulnya cukup besar.

Pola IHK di tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut terdapat kecenderungan mengalami

peningkatan, walaupun angka IHK dari bulan ke bulan memiliki nilai berfluktuasi. Pada tahun 2012 IHK dari bulan Januari sampai April mengalami fluktuasi, namun di bulan Mei IHK kembali meningkat dan kondisi ini terus berlanjut sampai di Oktober, dan November menurun dan naik lagi di bulan Desember. IHK pada bulan Desember ini merupakan IHK terbesar yang terjadi selama tahun 2012.

Selanjutnya IHK menurut kelompok pengeluaran (Tabel 3.2), IHK terbesar di tahun 2012 terdapat pada kelompok bahan makanan. Pada bulan Desember IHK sudah mencapai angka 160,91. Walaupun IHK di bulan tersebut merupakan angka tertinggi dibanding kelompok pengeluaran lainnya, namun tetap lebih rendah dibanding dengan IHK di bulan Januari dan Oktober, yaitu masing-masingnya sebesar 162,25 dan 161,11. Pada kelompok bahan makanan ini pola IHK bulanan sangat berfluktuasi, IHK yang tinggi di awal tahun diikuti oleh turun naiknya angka indeks secara berulang-ulang dengan titik

terendah terjadi di bulan Mei, yaitu sebesar 154,73.

Dengan adanya penurunan IHK pada kelompok bahan makanan menyebabkan inflasi bernilai negatif atau deflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Selama tahun 2012 terdapat enam bulan yang mengalami deflasi, dan paling besar terdapat pada bulan Februari, dimana inflasi mencapai -4,00 persen. Sedangkan inflasi terbesar terdapat pada bulan Juni yang mencapai 3,48 persen. Dengan berfluktuasinya nilai IHK ini menyebabkan laju inflasi tahunan pada kelompok bahan makanan menjadi kecil, bahkan yang paling kecil dibanding kelompok lainnya, walaupun memiliki IHK paling besar.

Kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi di tahun 2012 merupakan kelompok pengeluaran yang paling kecil angka IHK-nya. Rendahnya IHK pada kelompok pengeluaran ini sudah terjadi sejak awal tahun dan terus berlanjut sampai akhir tahun. IHK pada kelompok ini juga berfluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan

Januari IHK tercatat bernilai 112,58, meningkat sedikit demi sedikit sampai di bulan April mencapai 114,89. Pada bulan berikutnya IHK berfluktuasi dari akhirnya pada bulan Desember IHK tercatat sebesar 117,77. Walaupun memiliki nilai IHK berfluktuasi, namun inflasi bulanan secara umumnya tidak terlalu besar, kecuali pada bulan Agustus yang mencapai 3,83 persen. Dengan inflasi bulanan yang berfluktuasi, maka secara kumulatif perubahan IHK pada kelompok ini menjadi tidak terlalu tinggi dan di akhir tahun tercatat inflasi sebesar 4,13 persen atau hampir sama dengan laju inflasi umum.

IHK yang juga termasuk tinggi di tahun 2012 ditemui pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Berbeda pada kelompok bahan makanan, angka IHK pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau ini tidak berfluktuasi dan dari bulan ke bulan

selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Januari IHK adalah sebesar 145,38 sedangkan pada bulan Desember mencapai 157,23. Dengan selalu meningkatnya IHK tersebut menyebabkan kelompok ini selalu mengalami inflasi dan menjadi satu-satunya kelompok yang tidak ada mengalami penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Secara umum inflasi bulanan yang terjadi berada pada kisaran yang tidak terlalu besar, paling rendah terjadi pada bulan Januari (0,03 persen) dan paling tinggi terdapat pada bulan Agustus (1,76 persen). Walaupun inflasi bulanan tidak terlalu tinggi, namun karena selalu meningkat menjadikan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada tahun 2012 menjadi tinggi yaitu tercatat sebesar 8,18 persen, dan dibanding kelompok lainnya merupakan laju inflasi tertinggi kedua setelah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga.

Tabel 3.2.
Indeks Harga Konsumen (IHK) , Inflasi, dan Laju Inflasi
Kota Padang Tahun 2012
(2007 = 100)

Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Bahan Makanan			Makanan Jadi, minuman, rokok & Tembakau			Perumahan			Sandang		
	IHK	Inflasi i	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi i	IHK	Inflasi i	Laju Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	162,25	1,11	1,11	145,38	0,03	0,03	122,01	1,42	1,42	132,43	0,03	0,03
Februari	155,76	-4,00	-2,94	145,49	0,08	0,10	122,00	-0,01	1,41	133,15	0,54	0,57
Maret	155,65	-0,07	-3,00	147,77	1,57	1,67	122,70	0,57	2,00	133,10	-0,04	0,54
April	156,90	0,80	-2,22	148,43	0,45	2,13	123,12	0,34	2,34	133,97	0,65	1,19
Mei	154,73	-1,38	-3,58	148,58	0,10	2,23	123,04	-0,06	2,28	135,55	-0,31	0,88
Juni	160,12	3,48	-0,22	149,08	0,34	2,57	123,16	0,10	2,38	135,31	1,32	2,21
Juli	159,63	-0,31	-0,52	149,92	0,56	3,15	123,32	0,13	2,51	136,34	0,76	2,98
Agustus	160,14	0,32	-0,21	152,56	1,76	4,97	123,19	-0,11	2,40	137,09	0,55	3,55
September	158,89	-0,78	-0,98	154,28	1,13	6,15	123,22	0,02	2,43	139,53	1,78	5,39
Oktober	161,11	1,40	0,40	155,30	0,66	6,85	123,83	0,50	2,93	141,11	1,13	6,59
November	157,25	-2,40	-2,01	155,98	0,44	7,32	123,82	-0,01	2,93	141,01	-0,07	6,51
Desember	160,91	2,33	0,27	157,23	0,80	8,18	123,85	0,02	2,95	141,59	0,41	6,95

Lanjutan Tabel 3.2.

Tahun/ Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Kesehatan			Pendidikan, Rekreasi & Olahraga			Transpor & Komunikasi			Umum		
	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Januari	122,82	1,09	1,09	121,82	0,00	0,00	112,58	-0,46	-0,46	135,31	0,56	0,56
Februari	122,90	0,07	1,15	121,89	0,06	0,06	114,49	1,70	1,23	134,09	-0,90	-0,34
Maret	122,99	0,07	1,23	122,28	0,32	0,38	114,70	0,18	1,41	134,67	0,43	0,09
April	122,99	0,00	1,23	122,28	0,00	0,38	114,89	0,17	1,58	135,29	0,46	0,55
Mei	123,99	0,81	2,05	122,75	0,38	0,76	114,50	-0,34	1,24	134,71	-0,43	0,12
Juni	125,15	0,94	3,00	122,53	-0,18	0,58	114,52	0,02	1,26	136,35	1,22	1,34
Juli	125,57	0,34	3,35	123,32	0,64	1,23	114,48	-0,03	1,22	136,53	0,13	1,47
Agustus	125,91	0,27	3,63	123,31	-0,01	1,22	118,86	3,83	5,09	138,01	1,08	2,57
September	125,84	-0,06	3,57	136,54	10,73	12,08	117,38	-1,25	3,78	138,75	0,54	3,12
Oktober	125,97	0,10	3,68	136,54	0,00	12,08	117,38	0,00	3,78	139,73	0,71	3,85
November	125,98	0,01	3,69	136,54	0,00	12,08	117,38	0,00	3,78	138,85	-0,63	3,20
Desember	126,08	0,08	3,77	136,82	0,21	12,31	117,77	0,33	4,13	140,15	0,94	4,16

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2003 -2012, BPS Prov. Sumatera Barat

Selama tahun 2012, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga tercatat mempunyai laju inflasi terbesar dibanding kelompok lainnya. Laju inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 12,31 persen atau telah mencapai angka 2 digit. Tingginya angka inflasi pada kelompok tersebut dipicu oleh tingginya kenaikan biaya pendidikan, terutama pada bulan September yang mencapai angka 17,06 persen sehingga inflasi pada bulan tersebut mencapai 10,73 persen.

Pada tahun 2012, perubahan IHK umum atau dikenal juga dengan inflasi di Kota Padang yang termasuk tinggi ditemui di bulan Juni dan Agustus dengan angka 1,22 dan 1,08 persen. Penyumbang inflasi terbesar pada bulan Juni berasal dari kelompok bahan makanan dengan inflasi mencapai 3,48 persen dan kelompok sandang (1,32 persen), sedangkan pada bulan Agustus dipicu oleh inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (1,76 persen) dan kelompok transpor dan komunikasi (3,83 persen). Kelompok lainnya relatif jauh lebih rendah dengan inflasi di bawah 1

persen dan terdapat 2 bulan yang mengalami deflasi.

Penghitungan inflasi di Kota Padang merupakan salah satu dari penghitungan di 66 kota di Indonesia yang dijadikan dasar penghitungan angka inflasi nasional. Angka inflasi ini didapatkan dari penghitungan perubahan angka IHK dari suatu waktu ke waktu lainnya, misalnya dalam bulanan ataupun tahunan.

Secara umum angka inflasi lima tahun terakhir di Kota Padang berfluktuasi. Pada tahun 2008 laju inflasi berada pada angka yang tinggi, yaitu 12,68 persen. Tingginya laju inflasi di tahun 2008 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sehingga angka inflasi menyentuh sampai angka dua digit. Selanjutnya inflasi mengalami penurunan pada tahun 2009 dan merupakan laju inflasi terendah dalam periode 2008-2012. Penurunan angka inflasi ini memberi indikasi ke arah yang lebih baik bagi pembangunan negara Indonesia. Inflasi yang rendah akan menyebabkan daya beli masyarakat membaik sehingga perekonomian akan berjalan makin

bergairah. Daya beli yang membaik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin tinggi. Dan pada tahun 2009 tersebut inflasi mencapai angka yang menggembirakan, yaitu sebesar 2,05 persen. Namun inflasi kembali meningkat di tahun 2010, yaitu sebesar 7,84 persen, dan sedikit membaik di tahun 2011 menjadi 5,37 persen. Pada tahun 2012 inflasi kembali berhasil ditekan sehingga mencapai angka 4,16 persen.

Inflasi yang cukup terkendali merupakan kondisi yang sangat diharapkan. Untuk itu perlu kerjasama dari berbagai pihak misalnya Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Dengan terjaganya inflasi maka ini akan berpengaruh baik pada berbagai hal, antara lain kemiskinan bisa menjadi lebih rendah, pengangguran berkurang sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih optimal.

Tabel 3.3.
Laju Inflasi Kota Padang 2008-2012

Kelompok	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	12,68	2,05	7,84	5,37	4,16
Bahan Makanan	21,26	0,60	19,13	5,25	0,27
Makanan jadi,minuman,rokok&tembakau	13,73	6,53	5,69	8,08	8,18
Perumahan	8,01	2,93	1,74	3,72	2,95
Sandang	5,69	4,42	3,33	14,24	6,95
Kesehatan	4,87	1,28	4,00	5,05	3,77
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	9,01	0,16	3,88	5,95	12,31
Transportasi & komunikasi	10,05	-1,04	2,93	1,28	4,13

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2003-2012, BPS Prov. Sumatera Barat

Pada tahun 2012 hampir semua kelompok pengeluaran memberikan andil dalam peningkatan laju inflasi. Kelompok pengeluaran terbesar laju inflasinya adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan angka inflasi mencapai 12,31 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menempati urutan kedua, yakni sebesar 8,18 persen. Sedangkan yang paling kecil laju inflasi di tahun 2012 adalah yang berasal dari kelompok bahan makanan yakni sebesar 0,27 persen. Kondisi ini sedikit berbeda dengan keadaan tahun 2011 dimana kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi berada pada urutan terkecil, yaitu sebesar 1,28 persen, sedangkan kelompok sandang memiliki laju inflasi terbesar (14,24 persen).

3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2007-2011

Pertanian merupakan sektor yang utama di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari sektor

pertanian. Hal ini juga tercermin dari sumbangan sektor pertanian setiap tahunnya terhadap PDRB Sumatera Barat yang merupakan paling besar dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2012 sumbangan sektor pertanian ini mencapai 23,01 persen terhadap total PDRB Sumatera Barat. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa 40,60 persen penduduk Sumatera Barat yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani digunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Semenjak tahun 2008 penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100), sedangkan sebelumnya mulai tahun 1999 digunakan tahun dasar 1993 untuk menghitung NTP (1993 = 100).

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran perubahan harga-harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk barang-barang hasil produksinya. Dari It ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani dari tahun ke tahun, atau merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum *form gate* atau disebut juga sebagai harga di sawah/ladang setelah pemetikan.

Rata-rata indeks harga yang diterima petani di Sumatera Barat selama periode 2008 – 2012 menunjukkan hasil menggembirakan. Selama periode tersebut It selalu mengalami peningkatan, walaupun dengan persentase perubahan yang berbeda-beda. Pada tahun 2008 nilai It tercatat sebesar 119,78. Angka indeks ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 125,00 atau terjadi peningkatan sebesar 4,40 persen dan terus meningkat di tahun 2010 dengan nilai It semakin membaik (132,98).

Tabel 3.4.
Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani (It),
Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) Dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sumatera Barat, 2008-2012 (2007 = 100)

Tahun	It	Perubahan (%)	Ib	Perubahan (%)	NTP	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	119,78	19,8	113,95	14,0	105,18	5,2
2009	125,00	4,4	120,53	5,8	103,70	-1,3
2010	132,98	6,4	126,07	4,6	105,48	1,7
2011	141,05	6,1	132,75	5,3	106,25	0,7
2012	144,54	2,5	137,63	3,7	105,03	-1,1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2011 nilai It Sumatera Barat adalah 141,05 dengan perubahan sebesar 6,1 persen. Perubahan di tahun tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang memiliki perubahan 6,4 persen. Dan pada tahun 2012 It mencapai angka 144,54, namun perubahan hanya sebesar 2,50 persen. Perubahan It yang besar menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan penerimaan petani makin membaik.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangganya maupun biaya keperluan produksi pertaniannya. Selama periode tahun 2008-2012 di Sumatera Barat angka Ib menunjukkan tren yang sama dengan It, yaitu selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti secara rata-rata harga yang harus dibayar petani untuk barang dan jasa yang diperlukannya ternyata juga selalu meningkat namun dengan peningkatannya berfluktuasi.

Pada tahun 2012 angka Ib Sumatera Barat adalah 137,63. Dibanding tahun sebelumnya, telah terjadi perubahan sebesar 3,7 persen. Perubahan ini lebih rendah daripada perubahan tahun sebelumnya, dimana perubahan Ib pada tahun 2011 adalah 5,3 persen. Makin kecilnya peningkatan perubahan menunjukkan bahwa peningkatan harga yang dibayar petani juga makin kecil di tahun 2012 dibanding tahun 2011.

Nilai tukar petani (NTP) yang didapatkan dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) secara umum menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian umum. Jika nilai NTP yang diperoleh lebih besar dari 100 berarti daya beli masyarakat petani lebih baik dari tahun dasar, atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari tahun dasar. Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila nilai NTP lebih kecil dari 100, dimana petani mengalami defisit sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami penurunan. Sedangkan jika nilai NTP sama dengan 100 berarti tidak ada

perubahan daya beli masyarakat petani dibandingkan dengan tahun dasar.

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) di Sumatera Barat pada periode 2008-2012 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada lima tahun terakhir tersebut kondisi petani menunjukkan keadaan yang masih belum baik. Hal ini memberi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani masih belum seperti yang diharapkan.

Nilai NTP di Sumatera Barat yang berfluktuasi juga menyebabkan peningkatan NTP-nya berada pada keadaan yang berfluktuasi juga. Pada awal periode atau pada tahun 2008 NTP tercatat sebesar 105,18 dengan peningkatan sebesar 5,2 persen. Peningkatan pada tahun tersebut merupakan peningkatan terbaik yang terjadi dalam periode tersebut. Pada tahun 2008 tersebut.

NTP berada pada angka di atas 100 yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibanding tahun dasar. Pada tahun 2009 NTP juga masih berada di atas angka 100, namun angkanya lebih rendah dibanding tahun 2008 yaitu sebesar 103,70

sehingga mengalami peningkatan yang negatif. Pada tahun 2009 tersebut terjadi peningkatan sebesar -1,3 persen. Selanjutnya di tahun 2010 dan 2011 NTP meningkat menjadi 105,48 dan 106,25 atau peningkatan masing-masingnya sebesar 1,7 dan 0,7 persen.

Hasil perhitungan NTP pada tahun 2012 didapatkan bahwa nilai NTP Sumatera Barat adalah 105,03. Dengan nilai tersebut berarti terjadi pengurangan NTP atau telah terjadi penurunan sebesar -1,1 persen. Kondisi ini merupakan hal kurang menggembirakan karena petani makin berkurang tingkat kesejahteraannya.

3.3. Laju Inflasi di Pedesaan

Tingkat laju inflasi di pedesaan dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Dari hasil perhitungan Ib di Sumatera Barat didapatkan bahwa laju inflasi di pedesaan ternyata tidak selalu sejalan dengan laju inflasi di Kota Padang.

Tahun 2012 didapatkan perubahan Ib adalah 3,7 persen. Dari nilai Ib ini diketahui bahwa bila dibandingkan dengan perhitungan

inflasi di kota Padang yang tercatat sebesar 4,16 persen, laju inflasi di pedesaan ini lebih rendah dibanding dengan di kota Padang. Inflasi pedesaan yang lebih rendah dibanding dengan inflasi umum menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa di pedesaan lebih rendah dibanding dengan di perkotaan. Pada masyarakat pedesaan yang hidupnya relatif lebih sederhana, kebutuhan akan barang dan jasa juga lebih sedikit. Dengan demikian permintaan akan barang-barang tertentu juga tidak banyak. Berbeda dengan daerah kota dimana permintaan akan barang dan jasa

semakin besar, sementara sering suplai relatif tidak seiring dengan besarnya permintaan. Kondisi ini menyebabkan inflasi lebih tinggi di kota Padang dibanding di pedesaan Sumatera Barat. Terkendalnya inflasi yang terjadi baik di pedesaan ataupun di perkotaan terutama akibat terjaganya harga barang dan jasa di pasaran. Disamping itu lebih terkendalnya inflasi di pedesaan bisa juga karena distribusi barang-barang keperluan produksi pertanian seperti pupuk, bibit, ataupun pestisida makin lancar dan banyak tersedia di pasaran.

4

EKSPOR DAN IMPOR

☞ EKSPOR

☞ IMPOR

☞ NERACA PERDAGANGAN

Kegiatan ekspor impor merupakan agenda wajib dalam perdagangan setiap negara dimana ekspor impor sangat penting untuk melakukan pertukaran berupa barang atau jasa. Dengan kata lain, ekspor impor dilakukan untuk menutupi kekurangan ketersediaan produk suatu negara. Ekspor adalah sebuah kegiatan menjual barang maupun jasa pada negara lain. Sementara itu impor merupakan kegiatan yang dilakukan sebaliknya, yaitu kegiatan membeli barang maupun jasa dari negara lain. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ekspor berarti kegiatan menjual dan impor kegiatan membeli.

Kegiatan ekspor impor dapat menghasilkan pemasukan dari atau bagi negara yang disebut devisa. Devisa adalah proses masuknya uang asing ke suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran produk impor barang maupun jasa. Kegiatan ekspor impor tentu saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menambah devisa. Jika negara merasa kekurangan suatu produk maupun jasa atau memang sama sekali tidak menghasilkan produk tersebut, dilakukanlah kegiatan

impor. Sebaliknya jika negara mampu menghasilkan produk tertentu dalam jumlah melimpah dan dibutuhkan negara lain, dilakukanlah kegiatan ekspor. Pada dasarnya, kegiatan ekspor impor dapat menguntungkan kedua negara yang melakukan transaksi atau kerja sama demi pemenuhan kebutuhan rakyat.

Tahun 2012 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor impor secara nasional termasuk juga di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dipicu oleh kondisi ekonomi global seperti yang dialami negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang sampai saat ini belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Parahnya krisis yang melanda *Benua Putih* dan *Benua Merah* itu telah menjalari urat perekonomian hingga ke Asia. Akibatnya, permintaan dari sektor industri yang menggunakan bahan baku dari Indonesia seperti India dan China secara tak langsung menjadi semakin berkurang. Padahal negara-negara tersebut saat ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia umumnya dan khususnya bagi Sumatera Barat dalam memasarkan

komoditi unggulan seperti halnya *Crude Palm Oil* (CPO) ataupun yang lainnya.

Pertumbuhan nilai atau volume ekspor-impor rata-rata pertahun atau tren pertumbuhan jangka panjangnya menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja perdagangan Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia yang positif dapat dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara pesaingnya, atau oleh tren pertumbuhan jangka panjangnya yang meningkat. Tren pertumbuhan jangka panjang yang meningkat mencerminkan perubahan jangka panjang yang positif dari tingkat daya saing produk tersebut didalam perdagangan global.

Di beberapa pasar utama ekspor Indonesia sudah tercapai pemulihan ekonomi dalam pengertian sudah ada pertumbuhan positif di beberapa negara besar tapi belum bisa dipastikan apakah pertumbuhan positif di negara-negara itu akan terus berkesinambungan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia karena kinerja ekspor bukan semata-

mata tergantung dari kemampuan ekspor kita melainkan juga dari negara penerima ekspor.

Di masa mendatang pasar Asia akan tetap menjadi tumpuan pertumbuhan ekspor Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu diprediksi lebih tinggi dibanding negara tujuan ekspor utama Indonesia di wilayah lain (Amerika dan Eropa). Di masa tersebut diperkirakan ekspor ke tujuan baru seperti China, India dan Korea akan semakin kuat seiring pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Sementara itu, pemerintah akan berupaya mempertahankan pangsa ekspor ke negara tujuan ekspor tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang. Perdagangan ke negara tersebut dilakukan dengan tidak terlalu berharap pertumbuhannya tinggi karena pertumbuhan ekonominya walaupun sudah terjadi tapi masih dalam tingkat yang rendah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan agar kinerja ekspor tetap meningkat, seperti dengan upaya

diversifikasi negara tujuan ekspor, namun peningkatan ekspor nasional masih belum seperti yang diharapkan. Tiga pangsa ekspor utama Indonesia saat ini adalah negara Jepang, USA, dan Uni Eropa dimana negara tersebut merupakan penyumbang perekonomian dunia. Dengan terjadinya krisis global, diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia diarahkan ke pasar yang tidak terpengaruh pertumbuhannya seperti negara China, India, dan Korea.

Pemerintah sudah memprediksi sebelumnya bahwa nilai ekspor tahun 2012 akan sulit mencapai target seperti halnya tahun 2011 lalu. Hal tersebut, salah satunya dipicu karena masih berlangsungnya krisis global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa dan berimbas pada kinerja perekonomian di berbagai negara dunia lainnya. Realisasi ekspor Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 190,03 US \$ miliar atau lebih rendah 5-7 persen dari target yang ditetapkan. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan menargetkan jika pada tahun 2012 realisasi ekspor bisa mencapai angka yang

sama seperti realisasi pada tahun 2011 lalu yakni 203 miliar US \$.

Saat ini penggunaan instrumen perdagangan internasional berupa tuduhan *dumping*, subsidi, dan *safeguard* sudah banyak dilakukan negara maju maupun berkembang. Hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri ini bila tidak ditangani dapat mengakibatkan produk ekspor Indonesia kalah bersaing. Karena penggunaan bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta *holding order* dan *automatic detention*. Sehingga harga ekspor produk Indonesia menjadi mahal. Sedangkan dampak dari hambatan teknis perdagangan terjadinya pelarangan atau pemusnahan produk ekspor tersebut di negara tujuan. Juga, hambatan berupa *wanprestasi* yang membuat nama baik eksportir Indonesia menjadi jelek.

Praktik perdagangan internasional yang ditetapkan WTO atau organisasi perdagangan dunia, implementasinya belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini terbukti dari

masih banyaknya negara sesama anggota WTO memproteksi produsen atau industri dalam negerinya secara samar dengan mengangkat isu hambatan teknis perdagangan, terutama untuk produk-produk kompetitif.

Peluang Sumbar mengeksport produknya terbuka lebar. Pasalnya, Sumbar tidak memiliki kasus-kasus *trade remedies*, seperti tuduhan *dumping*, subsidi, dan *saveguard* dalam perdagangan internasional. Dulu pernah ada kasus ekspor asal berupa semen, tapi sekarang tidak ada. Namun, bukan berarti perdagangan luar negeri Sumbar bebas hambatan. Sebab, masing-masing negara tujuan ekspor menerapkan kebijakan tertentu sebagai hambatan teknis dalam melindungi impor ke negaranya, seperti standardisasi barang-barang impor tersebut.

Sementara untuk tahun mendatang pemerintah Sumatera Barat telah mengalokasikan dana sebesar 1,5 milyar rupiah untuk membiayai program peningkatan dan pengembangan ekspor dari daerah itu. Peningkatan dan pengembangan

ekspor salah satunya untuk mensiasati dampak krisis ekonomi global yang sempat mengakibatkan turunnya kegiatan dan nilai ekspor dari daerah ini. Untuk mengatasi dampak meluasnya dampak krisis global pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mencari pasar alternatif untuk komoditas ekspor andalan daerah ini. Selain itu juga mendorong produk lainnya diluar komoditi yang terdampak krisis ekonomi tersebut untuk dapat masuk pangsa pasar internasional.

Selain dampak krisis ekonomi global, penurunan ekspor komoditas non migas juga dipengaruhi oleh masih rendahnya daya saing produk yang dijual yang masih relatif rendah. Untuk mengatasi hal itu, dinas perindustrian dan perdagangan Sumatera Barat telah melakukan peningkatan mutu produk di tingkat petani melalui penyuluhan dan sosialisasi standar mutu produk sesuai dengan permintaan pasar ekspor.

4.1. Ekspor

Secara total nilai ekspor Sumatera Barat pada tahun 2012 adalah sebesar 2,36 milyar US\$.

Dibanding dengan tahun sebelumnya, besaran ekspor tersebut kurang mengembirakan karena pada tahun 2011 nilai ekspor lebih tinggi, yaitu tercatat sebesar 3,03 milyar US \$. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 22,11 persen.

Penurunan nilai ekspor juga seiring dengan penurunan volume ekspor. Tahun 2011 volume ekspor sudah mencapai 5,28 juta ton, sedangkan pada tahun 2012 volume ekspor sebesar 3,31 juta ton atau terjadi penurunan volume ekspor sebesar 37,31 persen.

Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Sumatera Barat masih didominasi oleh ekspor hasil industri. Pada tahun 2012, nilai ekspor dari hasil industri mencapai 2,25 milyar US \$ atau 95,34 persen dari total ekspor Sumatera Barat. Nilai ekspor tersebut berkurang dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2011 nilai ekspor sudah mencapai 2,77 milyar US \$, atau 91,23 persen dari total ekspor tahun 2011.

Sampai saat ini ekspor hasil industri yang berasal dari pengolahan

hasil pertanian masih mendominasi atau merupakan primadona ekspor Sumatera Barat. Ekspor utama dari kelompok tersebut adalah komoditi minyak kelapa sawit. Pada tahun 2011 telah diekspor sebanyak 1,36 juta ton minyak kelapa sawit dengan nilai 1,43 milyar US \$. Selanjutnya di tahun 2012 minyak kelapa sawit diekspor sebanyak 1,43 juta ton atau dengan nilai 1,32 milyar US \$. Secara volume terjadi peningkatan ekspor, namun secara nilai terjadi penurunan. Ini menunjukkan adanya penurunan harga minyak kelapa sawit di pasaran dunia. Pada kondisi tersebut, volume ekspor minyak kelapa sawit meningkat sebesar 5,15 persen, sedangkan nilai ekspor berkurang sebesar 7,69 persen.

Setelah minyak kelapa sawit, terdapat dua komoditi industri pengolahan hasil pertanian yang juga menonjol nilai ekspornya. Kedua hasil industri tersebut adalah *crumb rubber* (karet remah) dan minyak biji kelapa sawit. Pada tahun 2012 masing-masing komoditi tersebut telah diekspor senilai 702,78 juta US \$ dan 97,06 juta US \$.

Kondisi yang sama dengan ekspor hasil industri adalah pada hasil pertanian yang juga mengalami penurunan di tahun 2012 dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 tercatat ekspor hasil pertanian Sumatera Barat sudah mencapai 94,42 juta US \$, dan di tahun 2012 berkurang 44,71 persen sehingga nilai ekspor menjadi 52,20 juta US \$.

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, di tahun 2012 biji coklat masih merupakan hasil pertanian yang paling dominan diekspor dari Sumatera Barat. Nilai ekspor biji coklat di tahun 2011 sudah mencapai 56,03 juta US \$ dengan volume 20,16 ribu ton. Namun pada tahun 2012 diekspor dengan volume yang lebih kecil, yaitu sebanyak 14,01 ribu ton dan dengan nilai ekspor 31,82 juta US \$.

Selain biji coklat, hasil pertanian utama yang diekspor dari Sumatera Barat adalah buah-buahan serta kayu manis dan bunganya. Pada tahun 2012 ekspor kedua komoditi tersebut masing-masing sebesar 5,61 ribu ton dan 1,95 ribu ton dengan nilai 4,85 dan 2,56 juta US \$. Pada tahun

2011 ekspor kayu manis dan bunganya menempati urutan kedua setelah biji coklat namun di tahun 2012 berada pada urutan ketiga setelah ekspor buah-buahan. Pada tahun 2012 ekspor kayu manis dan bunganya mengalami penurunan yang drastis baik dari sisi volumen maupun nilai ekspornya.

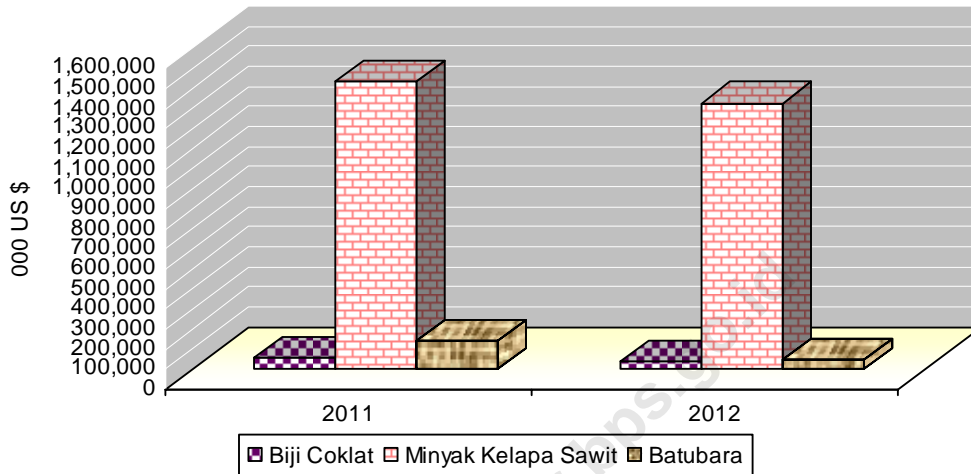
Pada tahun 2011 selain dari hasil perkebunan, yang juga makin menunjukkan eksistensi adalah ekspor dari hasil perikanan atau kelautan. Pada tahun itu telah diekspor ikan tongkol/tuna senilai 991,40 ribu US \$, dan juga jenis komoditi lainnya seperti ikan lainnya (73,15 ribu US \$) dan udang segar/beku (1,20 ribu US \$). Namun pada tahun 2012 ekspor hasil perikanan atau kelautan melemah dengan berkurangnya ekspor dari Sumatera Barat. Ekspor ikan tongkol/tuna pada tahun tersebut menjadi senilai 241,33 ribu US \$, sedangkan komoditas ikan lainnya dan udang segar/beku masing-masingnya senilai 61,91 ribu US \$ dan 0,13 ribu US \$. Namun pada tahun 2012 itu mulai diekspor kepiting, kerang-kerangan sebanyak 0,74 ton atau senilai 3,24 ribu US \$.

Tabel 4.1.
Perkembangan Volume Dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Jenis Komoditi, 2011-2012

Jenis Komoditi	2011		2012	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Hasil Pertanian</u>	351 983,62	94 420,94	221 239,97	52 199,87
1. Biji Coklat	20 163,81	56 027,73	14 012,25	31 821,61
2. Buah-buahan	4 620,63	5 396,45	5 613,43	4 847,35
3. Kayu Manis & Bunganya	10 798,30	14 005,76	1 949,96	2 562,62
4. Kopi	257,40	457,38	137,64	286,31
5. Biji Pala & Bunganya & kapulaga	27,24	111,81	23,28	283,05
6. Ikan Tongkol / Tuna	248,56	991,40	58,68	241,33
7. Lada Putih	-	-	25,00	209,50
8. Ikan Lainnya	33,70	73,15	22,04	61,91
9. Kepiting, Kerang-kerangan	-	-	0,74	3,24
10. Udang Segar/Beku	0,72	1,20	0,07	0,13
11. Hasil Pertanian Lainnya	315 833,26	17 356,08	199 396,89	11 882,83
<u>Hasil Industri</u>	2 081 004,83	2 766 067,47	2 074 336,56	2 254 501,67
1. Minyak Kelapa Sawit	1 359 581,92	1 434 839,53	1 426 473,67	1 325 764,46
2. Karet Remah (Crumb Rubber)	210 663,34	972 985,90	219 764,73	702 778,66
3. Minyak Biji Kelapa Sawit	126 489,71	203 467,88	95 883,52	97 065,43
4. Crepe	17 073,00	79 679,46	10 413,90	35 471,90
5. Asam berlemak lainnya	15 285,70	12 893,95	23 742,75	18 380,30
6. Minyak Atsiri Lainnya	236,71	15 103,60	4 938,54	17 432,76
7. Makanan Olahan	3 612,45	3 941,54	9 652,20	10 131,04
8. Buah/Sayuran Olahan	3 170,97	5 483,65	5 534,29	8 323,98
9. Minuman Olahan	481,00	375,94	3 690,20	2 961,03
10. Sheet	-	-	249,60	702,14
11. Ikan Olahan	115,77	254,70	44,26	230,25
12. Kayu Olahan lain	318,68	118,04	144,70	55,48
13. Hasil Industri Lainnya	343 975,57	36 923,28	273 804,22	35 204,24
<u>Hasil Pertambangan</u>	2 845 724,90	171.326,66	1 017 326,22	56 881,61
1. Batu Bara	1 983 188,23	135.535,95	687 846,35	43 975,48
2. Biji Tembaga	2 757,82	252,98	93,98	6,58
3. Hasil Tambang Lain	859 778,86	35.537,73	329 385,89	12 899,56
Jumlah	5 278 713,36	3.031.815,07	3 312 902,76	2 363 583,15

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.1.
Perkembangan Nilai Ekspor Utama Hasil Pertanian, Industri
dan Pertambangan di Sumatera Barat, 2011-2012
 (000 US \$)



Sama halnya dengan kondisi di tahun 2011, di tahun 2012 nilai ekspor hasil pertambangan menempati urutan ke dua setelah ekspor hasil industri. Walaupun masih menempati posisi kedua dalam jenis komoditi, namun terjadi penurunan ekspor yang besar dari jenis hasil pertambangan. Pada tahun 2011 telah diekspor hasil pertambangan sebanyak 2,84 juta ton atau setara dengan nilai 171,33 juta US \$. Namun pada tahun 2012 berkurang menjadi 1,02 juta ton atau senilai 56,88 juta US. Penurunan ekspor hasil pertambangan ini terjadi pada semua jenis hasil pertambangan. Ekspor pertambangan yang utama

dari Sumatera Barat, yaitu batubara pada tahun 2012 tercatat sebanyak 687,85 ribu ton dengan nilai sebesar 43,98 juta US \$, sedangkan pada tahun 2011 sudah mencapai 1,98 juta ton dengan nilai sebesar 135,54 juta US \$. Selain batu bara, ekspor utama dari hasil pertambangan adalah biji tembaga, dimana pada tahun 2012 diekspor biji tembaga sebesar 93,98 ton dengan nilai 6,58 ribu US \$ dan di tahun 2011 sebanyak 2,76 ribu ton dengan nilai 252,98 ribu US \$. Selanjutnya hasil tambang lainnya di tahun 2012 diekspor senilai 12,90 juta US \$.

Kurang baiknya kinerja ekspor di Provinsi Sumatera Barat tak lepas dari kondisi perekonomian Sumatera Barat secara umum. Selanjutnya di tahun 2012 kondisi yang makin kurang baik juga dipengaruhi dengan makin melemahnya permintaan ekspor di pasaran dunia terutama dari negara-negara Eropa, India dan Pakistan

Tiga negara tujuan ekspor Sumatera Barat yang utama dewasa ini adalah India, Amerika Serikat (USA) dan Singapura. Ketiga negara tersebut berturut-turut menguasai pangsa pasar sebesar 29,70; 25,61 dan 15,96 persen atau secara bersama ketiga negara tersebut menerima ekspor Sumatera Barat sebesar 71,27 persen.

Posisi pertama dari negara tujuan ekspor Sumatera Barat pada tahun 2012 adalah negara India. Pada tahun tersebut ekspor ke India mencapai 701,90 juta US \$, sedikit menurun dibanding tahun 2011 yang tercatat 898,21 juta US \$.

Selanjutnya tujuan ekspor Sumatera Barat yang menempati urutan kedua adalah negara Amerika Serikat (USA). Pada tahun 2012 terjadi pengurangan nilai ekspor ke Amerika bila dibanding dengan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2011 ekspor tercatat sebesar 902,78 juta US \$ namun di tahun 2012 berkurang menjadi 605,39 juta US \$.

China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ternyata juga merupakan negara penerima ekspor utama dari Sumatera Barat. Pada tahun 2012, dengan nilai ekspor sebesar 233,41 juta US \$ China menempati posisi keempat sebagai negara importir produk dari Sumatera Barat. Walaupun untuk tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 354,99 juta US \$, namun ekspor ke China masih memberikan pangsa yang cukup besar (9,88 persen).

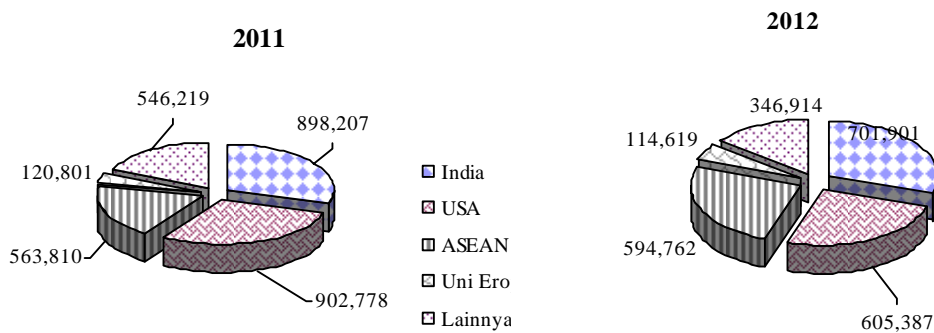
Kelompok negara ASEAN merupakan pangsa pasar komoditi Sumatera Barat yang potensial. Selama tahun 2012, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN adalah sebesar 480,14 juta US \$. Dibanding tahun 2011, nilai ekspor mengalami penurunan, karena di tahun 2011 mencapai 561,06 juta US \$. Negara ASEAN utama yang merupakan tujuan ekspor Sumatera Barat pada tahun 2012 adalah negara

Singapura, dengan nilai ekspor mencapai 377,20 juta US \$, meningkat dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 322,04 juta US \$ dan menempatkan Singapura pada urutan ketiga sebagai negara penerima ekspor Sumatera Barat.

Selain Singapura, tujuan ekspor utama lainnya di kawasan ASEAN adalah negara serumpun Malaysia, dimana di tahun 2012 nilai ekspor mencapai 69,11 juta US \$.

Nilai yang cukup menggembirakan terdapat juga pada ekspor Sumatera Barat ke negara Pakistan. Ekspor ke Pakistan pada tahun 2012 mencapai 118,42 juta US \$ atau merupakan 5,01 persen dari total ekspor Sumatera Barat. Walaupun bukan yang utama, tapi ekspor ke Pakistan ini sangat menggembirakan karena terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya senilai 34,86 juta US \$.

Gambar 4.2.
Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2011-2012
(000 US \$)



Tabel 4.2
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Negara Tujuan, 2011-2012

Jenis Komoditi	2011*)		2012	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Apec ASEAN	589 875,71	561 057,19	547 193,69	480 142,75
- Singapura	279 128,79	322 037,09	390 026,01	377 196,39
- Malaysia	141 820,35	200 354,47	63 285,55	69 110,20
- Thailand	141 492,42	19 273,52	69 771,29	11 743,47
- Vietnam	7 266,00	1 175,39	188,00	174,96
- Myanmar	15 299,74	17 604,70	23 899,59	21 881,31
- Filipina	4 865,31	608,75	-	-
- Brunei Darussalam	3,09	3,27	23,25	36,42
Uni Eropa	300 788,46	120 801,04	196 487,00	114 619,17
- Belanda	82 660,72	85 918,36	89 744,21	65 550,86
- Italia	168 286,05	8 947,08	72 640,99	13 338,19
- Portugal	507,95	1 078,34	24,00	49,63
- Jerman	1 344,30	4 576,95	1 100,63	2 524,47
- Spanyol	6 284,16	6 027,68	27 643,05	26 953,60
- Perancis	173,79	326,36	159,75	268,13
- Swedia	139,37	195,47	25,00	29,85
- Yunani	2 396,80	3 411,85	3 786,32	3 695,86
- Inggris	10 992,36	1 632,77	782,20	1 183,64
- Belgia	298,44	367,75	559,49	987,54
- Denmark	10,16	23,98	21,37	37,42
- Finlandia	8 024,94	7 153,81	-	-
- Ireland	19 666,37	1 140,65	-	-
Apec Nafta	202 922,63	909 630,70	202 741,77	614 872,45
- Kanada	1 628,08	6 852,95	3 382,60	9 426,58
- Amerika Serikat	201 294,55	902 777,74	199 337,75	605 387,17
- Mexico	-	-	21,42	58,70
Apec Lainnya	2 053 202,91	358 159,30	841 969,59	237 188,17
- Australia	0,17	0,78	175,40	342,32
- China	2 025 089,21	354 991,75	819 644,48	233 406,94
- Hongkong	12,31	28,26	10,62	43,51
- Jepang	19 907,75	2 132,38	7 235,33	960,91
- Korea, Republic of	8 174,97	1 004,62	14 553,44	1 725,68
- Taiwan, Province of China	18,50	1,50	350,32	708,80
Lainnya	2 131 923,65	1 082 166,82	1 524 510,70	916 760,62
- India	1 575 698,95	898 207,18	940 246,19	701 900,73
- Pakistan	121 608,88	34 862,23	221 981,84	118 422,28
- Negara Lainnya	434 615,83	149 097,41	362 282,68	96 437,61
Jumlah	5 278 713,36	3.031.815,05	3 312 902,76	2 363 583,15

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Data diperbaiki

Di tahun 2011 ekspor ke negara Uni Eropa mencapai 120,80 juta US \$, selanjutnya di tahun 2012 berkurang menjadi 114,62 juta US \$. Perkembangan ekspor ke negara Uni Eropa tidak sama antara satu negara dengan yang lainnya, ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan, namun secara umum kondisi pangsa pasar di tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 2011.

Negara Uni Eropa yang merupakan pangsa pasar utama Sumatera Barat adalah negeri Belanda. Sebagai negara yang mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia, ekspor Sumatera Barat ternyata paling banyak dikirim ke negeri kincir angin tersebut dibanding negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2011 ekspor ke negeri Belanda adalah sebesar 85,92 juta US \$, namun di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 65,55 juta US \$.

4.2. Impor

Impor barang di Sumatera Barat dilakukan melalui dua tempat, yaitu melalui pelabuhan laut dan

udara. Barang yang diimpor melalui pelabuhan laut datang dari pelabuhan Muara dan pelabuhan Teluk Bayur. Sedangkan yang dari pelabuhan udara saat ini masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Selama periode tahun 2003-2012 impor barang ke Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Namun sejak tahun 2009 terlihat bahwa impor yang dilakukan makin meningkat, dan keadaan pada tahun 2012 merupakan yang terbesar dalam periode tersebut, yaitu sebanyak 1.580.604 ton, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2005 (40.782 ton). Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.300.782 ton, dan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan sebesar 21,51 persen.

Seiring dengan berfluktuasinya volume impor barang di Sumatera Barat, pada nilai impor juga ditemui kondisi yang berfluktuasi pada periode 2003 – 2012. Sampai dengan keadaan tahun 2005 nilai impor selalu mengalami penurunan yang dimulai dengan nilai impor pada awal periode yang tercatat pada angka 31,13 juta

US \$, namun pada tahun 2005 hanya 42 ribu US \$. Dan sejak tahun 2006 nilai impor Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan pada tahun 2008 nilai impor telah mencapai 476,46 juta US \$. Seiring dengan peningkatan volume impor yang mencapai jumlah tertinggi di tahun 2012, nilai impor juga meningkat menjadi 1,24 milyar US \$.

Sebagian besar barang impor ke Provinsi Sumatera Barat masuk melalui pelabuhan Teluk Bayur, yang

merupakan pelabuhan laut yang utama. Kondisi ini tidak mengalami perubahan selama satu dasawarsa ini. Sama halnya dengan total impor, impor barang dari pelabuhan Teluk Bayur mulai menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2005. Di tahun sebelumnya volume dan nilai impor cenderung berfluktuasi. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan impor, namun di tahun selanjutnya pemasukan barang impor melalui pelabuhan Teluk Bayur selalu meningkat.

Tabel 4.3.
Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2003-2012

Tahun	Volume (ton)				Nilai (000 US\$)			
	Teluk Bayur	Tabing/ BIM ¹⁾	Muaro/ Padang (PTT)	Jumlah	Teluk .Bayur	Tabing/ BIM ¹⁾	Muaro/ Padang (PTT)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
2003	215 364	5	1	215 370	30 815	310	7	31 133
2004	90 683	1	-	90 684	15 591	57	-	15 648
2005	-	900	39 882	40 782	-	16	26	42
2006	254 868	32	-	254 900	36 286	526	-	36 812
2007	531 247	7	-	531 254	95 583	279	-	95 862
2008	856 830	3	0	856 833	476 310	146	1	476 457
2009	656 688	0	-	656 688	346 198	49	-	346 247
2010	1 123 634	1	-	1 123 635	751 285	93	-	751 378
2011	1 300 779	3	-	1 300 782	1 075 141	1 597	-	1 076 738
2012	1 580 358	6	240	1 580 604	1 223 858	2 101	16 968	1 242 927

Sumber : BPS, Jakarta

Keterangan : ¹⁾ Sejak tahun 2005 ekspor / impor melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.580.358 ton komoditas atau setara dengan nilai 1,22 milyar US \$ diimpor melalui pelabuhan Teluk Bayur. Selanjutnya sebanyak 240 ton atau senilai 2,1 juta US \$ barang diimpor melalui pelabuhan Muaro. Sisanya melalui pelabuhan udara yaitu melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan volume 6 ton atau dengan nilai 2,10 juta US \$.

Sampai dengan keadaan tahun 2008, golongan barang yang termasuk pada bahan baku dan hasil tambang merupakan kelompok yang paling besar volumenya diimpor ke Sumatera Barat. Pada tahun 2008 tercatat volume impor kelompok barang ini sebesar 332.554 ton. Namun mulai tahun 2009 golongan barang ini bukan yang paling besar volume impornya, dimana di tahun itu volume impor golongan barang tersebut berkurang menjadi sebesar 123.809 ton dan menempati urutan kedua. Volume impor terbesar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah golongan barang yang termasuk pada bahan bakar, bahan penyemir, dsb, dimana dalam masa empat tahun

tersebut golongan barang tersebut makin lama makin banyak diimpor. Pada tahun 2012 volume impor golongan barang tersebut mencapai 958,74 ribu ton, atau 60,66 persen dari keseluruhan volume barang yang diimpor ke Sumatera Barat.

Untuk kondisi tahun 2008, volume impor yang besar belum berarti nilai impor juga besar. Bila dilihat dari segi nilai impor, ternyata yang paling tinggi di tahun 2008 adalah golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dsb. Pada tahun tersebut impor barang yang termasuk kelompok tersebut adalah senilai 278,54 juta US \$. Sementara itu di tahun 2009 sampai tahun 2012 golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dsb tetap merupakan nilai impor paling tinggi dengan volume impor paling besar juga. Tercatat berturut-turut di tahun-tahun tersebut senilai 302,10; 604,75; 872,45, juta dan 1,01 milyar juta US \$ bahan bakar, bahan penyemir, dsb diimpor ke Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.4.

Volume Impor Menurut Barang 1 Digit STIC 2008-2012 (ton)

Kode STIC	Golongan Barang	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	23 400	-	28 100	78 433	72 067
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	332 554	123 809	159 910	187 065	208 853
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	261 304	500 578	781 897	817 845	958 736
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	212 280	15 297	123 603	156 037	70 232
6	Hasil industri pabrik	25 956	16 096	26 344	48 580	253 734
7	Mesin dan alat angkutan	1 318	901	3 032	12 752	16 858
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	21	8	749	71	124
Jumlah		856 833	656 689	1 123 635	1 300 782	1 580 604

Sumber: BPS, Jakarta

Tabel 4.5.

Nilai Impor Menurut Golongan Barang I Digit STIC 2008-2012 (000 US\$)

Kode STIC	Golongan Barang	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	7 826	-	15 061	36 375	35 119
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	36 042	3 890	6 087	9 894	10 241
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	278 536	302 103	604 751	872 448	1 011 046
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	112 928	9 992	50 220	69 737	35 019
6	Hasil industri pabrik	27 914	18 596	50 716	30 128	50 766
7	Mesin dan alat angkutan	12 903	11 263	21 862	57 765	99 893
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	307	404	2 682	391	843
Jumlah		476 466	346 247	751 378	1 076 738	1 242 927

Sumber: BPS, Jakarta

4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat

Mengingat begitu strategisnya peranan perdagangan luar negeri dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menggairahkan dunia usaha. Diharapkan dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan akan menaikkan cadangan devisa negara dan dapat lebih memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Selama periode 2008-2012, neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor selalu lebih besar daripada kinerja impor. Walaupun

neraca perdagangan selalu mengalami surplus, namun nilainya cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2008 surplus perdagangan sudah mencapai 1,91 milyar US \$, sedangkan pada tahun 2009 berkurang menjadi 998,01 juta US \$ yang merupakan akibat dari penurunan kinerja ekspor dan impor. Selanjutnya di tahun 2010 neraca perdagangan kembali meningkat menjadi 1,46 milyar rupiah dan di tahun 2011 mencapai puncaknya menjadi 1,96 milyar rupiah. Hal ini merupakan indikasi yang baik, karena kinerja ekspor yang lebih baik akan meningkatkan gairah masyarakat untuk berusaha. Namun pada tahun 2012 kondisi ini mengalami sedikit penurunan sehingga neraca perdagangan Sumatera Barat tercatat menjadi 1,12 milyar rupiah.

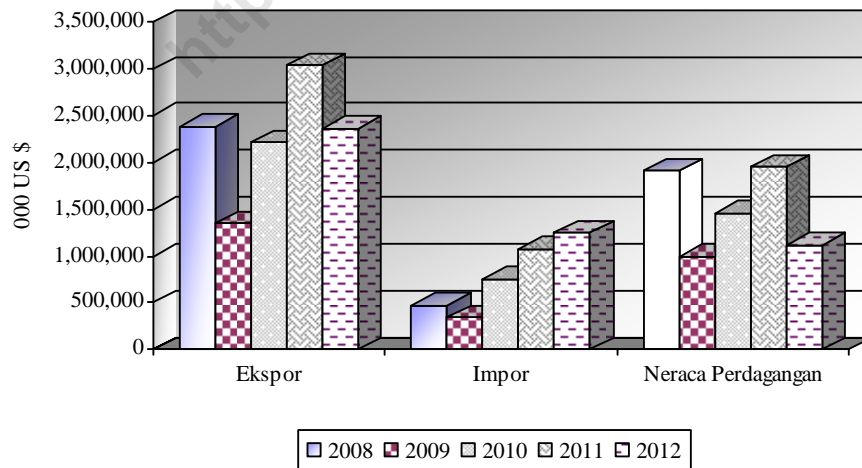
Tabel 4.6.

Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2008-2012 (000 US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	2 384 568	476 466	1 908 102
2009	1 344 257	346 247	998 009
2010	2 214 774	751 378	1 463 397
2011	3 031 815	1 076 738	1 955 077
2012	2 363 583	1 242 927	1 120 656

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.3.
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2008-2012



5

KEUANGAN DAERAH

- ☞ **KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
- ☞ **KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Secara menyeluruh tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan mengikuti program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah menyusun suatu anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mempunyai tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dalam APBD tersebut tercakup perencanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ini sangat besar, yang bersumber dari potensi daerah tersebut dan sumber lain. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, kemampuan daerah sangat diperlukan untuk menggali seoptimal mungkin sumber daya yang ada.

5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat di tahun 2012 menunjukkan kondisi yang cukup bagus. Ditahun tersebut pendapatan meningkat dibanding tahun 2011, demikian juga halnya dengan belanja yang juga bertambah besar. Namun kondisi pada tahun 2012 ini menunjukkan bahwa belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan, berbeda dengan keadaan pada tahun sebelumnya, dimana realisasi belanja lebih kecil dibanding pendapatan daerah.

Pada tahun 2012 realisasi pendapatan daerah mencapai 2,92 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 2,96 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 2,18 triliun rupiah dan belanja sebesar 2,13 triliun rupiah.

5.1.1. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penerimaan atau pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga sumber. Ketiga sumber ini adalah pendapatan Asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sama dengan kondisi di tahun 2011 sumber pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terbesar pada tahun 2012 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pada urutan kedua ditempati oleh dana perimbangan. Selanjutnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berada di urutan ketiga namun dalam jumlah yang meningkat banyak dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) terbagi atas empat (4) bagian, yaitu yang berasal dari (1) pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2012 Provinsi Sumatera Barat telah berhasil merealisasikan pendapatan dari PAD sebanyak 1,224 triliun rupiah. Realisasi PAD ini hampir sama dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 1,225 triliun rupiah.

Realisasi PAD ini sebagian besar berasal dari pajak daerah dimana pada tahun 2012 pajak daerah merupakan 81,16 persen dari total PAD. Dari empat sumber PAD, hanya realisasi pendapatan dari pajak daerah yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 realisasi pajak daerah tercatat sebesar 983,60 milyar rupiah dan di tahun 2012 meningkat menjadi 994,57 milyar rupiah. Selanjutnya realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat menjadi 38,05 milyar rupiah atau berkurang dari sebelumnya di tahun 2011 yang sudah mencapai 41,70 milyar rupiah. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2012 didapatkan

PAD sebesar 80,35 milyar rupiah, menurun dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 80,45 milyar rupiah. Sedangkan pada penerimaan yang termasuk pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang dari 118,66 milyar rupiah di tahun 2011 menjadi 112,52 milyar rupiah di tahun 2012.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi dari dana perimbangan yang diterima Provinsi Sumatera Barat di tahun 2012 meningkat dibanding tahun 2011. Pada tahun 2012 tercatat dana perimbangan sebesar 1,13 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2011 dana perimbangan Sumatera Barat adalah sebesar 931,88 milyar rupiah. Sebagian besar dari dana perimbangan adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tahun 2012 terealisasi sebesar 918,56 milyar rupiah. Dana perimbangan yang lainnya adalah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak yang terealisasi sebesar 192,83 milyar rupiah dan

dana alokasi khusus terealisasi sebesar 32,50 milyar rupiah di tahun yang sama. Dari ketiga kelompok dana perimbangan ini yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya hanya dua, yaitu pada dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU), sedangkan dana alokasi khusus (DAK) justru berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tercatat dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK masing-masingnya berjumlah 126,47 ; 764,68 dan 40,77 milyar rupiah.

Pendapatan daerah yang termasuk pada lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2011 didapatkan penerimaan daerah dari kelompok ini baru sebesar 27,66 milyar rupiah, sementara itu di tahun 2012 sudah mencapai 553,22 milyar rupiah. Dan pendapatan daerah tersebut di tahun 2012 hanya terealisasi atas dua macam, yaitu hibah yang terealisasi sebesar 552,48 milyar rupiah dan dana penyesuaian dan

otonomi khusus sebesar 735 juta rupiah, atau kondisi ini sama dengan keadaan tahun 2011 yang masing-masingnya terealisasi sebesar 9,01 dan 18,65 milyar rupiah. Walaupun realisasi pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdapat dari dua kelompok, namun berada dalam kondisi yang berbeda, dimana kenaikan yang signifikan terdapat pada hibah, sedangkan pada dana penyesuaian dan otonomi justru berkurang. Sedangkan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya tidak ada realisasinya pada APBD Sumatera Barat.

5.1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk operasional guna penyelenggaraan roda pemerintahan. Selanjutnya hal ini akan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Laporan realisasi APBD tahun 2012 menyatakan bahwa belanja daerah pemerintah Sumatera Barat adalah sebesar 2,96 triliun rupiah. Realisasi belanja ini mengalami meningkat dibanding tahun 2011 yang terealisasi sebanyak 2,13 triliun rupiah atau pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 38,97 persen.

Belanja daerah dalam APBD dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum. misalnya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon, dimana ada atau tidak ada program/kegiatan tetap harus dibayar. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok

belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

**Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2011-2012 (rupiah)**

Uraian (1)	Tahun	
	2011*) (2)	2012 (3)
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>		
Pendapatan Asli Daerah	1 224 414 657 998	1 225 490 641 909
Pajak Daerah	983 602 412 906	994 570 032 108
Retribusi daerah	41 698 484 580	38 054 666 361
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisahkan	80 453 318 003	80 348 993 075
Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah	118 660 442 509	112 516 950 365
Dana Perimbangan	931 882 621 632	1 134 895 852 485
Dana Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak	126 468 426 632	192 834 767 485
Dana Alokasi Umum	764 680 895 000	918 560 365 000
Dana Alokasi Khusus	40 773 300 000	32 500 720 000
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	27 661 612 864	553 220 265 000
Hibah	9 011 962 864	552 485 265 000
Dana Darurat	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dr Prop & Pemda lainnya	0	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18 649 650 000	735 000 000
Bantuan keuangan dari Pemda Lainnya	0	0
Jumlah Pendapatan	2 183 958 892 494	2 922 606 759 394
<u>BELANJA DAERAH</u>		
Belanja Tidak Langsung	1 087 714 687 082	1 595 303 203 222
Belanja Langsung	1 045 241 836 333	1 369 913 009 899
Jumlah Belanja Daerah	2 132 956 523 415	2 965 216 213 121
<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>		
Penerimaan Pembiayaan	335 247 914 024	361 250 283 093
Pengeluaran Pembiayaan	25 000 000 000	42 500 000 000
<u>Pembiayaan Netto</u>	310 247 914 014	318 750 283 093

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Keterangan : *) Data diperbaiki

Sama halnya dengan keadaan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 pengeluaran untuk belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung. Pada tahun tersebut realisasi belanja tidak langsung adalah 1,59 triliun rupiah, sedangkan belanja langsung sebesar 1,37 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2011 realisasi belanja tidak langsung tercatat sebesar 1,09 triliun rupiah, dan belanja langsung dengan nilai 1,07 triliun rupiah.

5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara total APBD dari pos penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat pada tahun 2012 adalah 11,69 triliun rupiah. Sumber penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar 9,56 triliun rupiah atau mencapai 81,78 persen dari total APBD tersebut. Sementara itu penerimaan yang berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah masing-masingnya berjumlah 811,42 milyar dan 1,32 triliun rupiah.

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Sumatera Barat, Kota Padang mempunyai penerimaan APBD yang paling besar. Di tahun 2012 pendapatan APBD Kota Padang diperkirakan mencapai 1,43 triliun rupiah. Sebagaimana halnya dengan total penerimaan pada kabupaten/kota se Sumatera Barat, sumber penerimaan terbesar Kota Padang juga berasal dari dana perimbangan yang tercatat sebanyak 994,05 milyar rupiah. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah terdapat dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu masing-masingnya 202,96 milyar rupiah dan 230,56 milyar rupiah.

Dibanding dengan Kota Padang, daerah kota yang lain di Sumatera Barat mempunyai penerimaan APBD yang jauh lebih kecil, bahkan tidak mencapai setengahnya. Namun keenam daerah kota tersebut memiliki range APBD yang tidak terlalu jauh antara satu dengan lainnya. Setelah Kota Padang, kota Payakumbuh menempati urutan kedua dalam hal jumlah penerimaan pendapatan. Pada tahun 2012 APBD

Payakumbuh adalah sebesar 454,84 milyar rupiah sedangkan yang paling kecil adalah APBD Kota Padang Panjang sebesar 368,25 milyar rupiah.

Tabel 5.2.
Ringkasan APBD Kabupaten/Kota Menurut Sumber Penerimaan Tahun 2012
(rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain pendapatan yang syah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Kabupaten				
1. Kep. Mentawai	32 709 775 999	428 502 926 787	22 834 258 211	484 046 960 997
2. Pesisir Selatan	36 322 930 000	709 948 143 000	121 090 360 000	867 361 433 000
3. Solok	23 153 223 615	598 168 741 337	68 901 084 739	690 223 049 691
4. Sijunjung	32 540 000 000	453 052 864 000	48 947 130 900	534 539 994 900
5. Tanah Datar	48 778 331 000	585 299 495 000	15 610 160 000	649 687 986 000
6. Padang Pariaman	40 096 989 386	641 215 201 366	86 468 266 856	767 780 457 608
7. Agam	37 002 638 721	691 746 904 347	102 869 909 110	831 619 452 178
8. 50 Kota	22 633 777 000	621 451 094 000	84 292 059 000	728 376 930 000
9. Pasaman	25 544 177 774	491 030 911 736	100 247 567 992	616 822 657 502
10. Solok Selatan	22 755 672 725	376 142 350 136	75 511 610 189	474 409 633 050
11. Dharmasraya	45 198 998 800	420 335 144 324	43 926 639 348	509 460 782 472
12. Pasaman Barat	33 701 786 100	534 860 540 050	85 304 074 990	653 866 401 140
B. Kota				
71. Padang	202 965 239 515	994 053 098 640	230 555 789 996	1 427 574 128 151
72. Solok	26 267 068 969	321 683 298 373	30 872 463 915	378 822 831 257
73. Sawahlunto	34 889 973 860	311 403 128 063	79 713 671 074	426 006 772 997
74. Padang Panjang	32 550 471 000	308 456 910 000	27 243 430 000	368 250 811 000
75. Bukittinggi	49 187 681 453	365 068 872 499	11 834 224 569	426 090 778 521
76. Payakumbuh	50 021 020 000	362 113 805 240	42 703 754 000	454 838 579 240
77. Pariaman	15 096 327 357	343 999 363 069	39 302 921 040	398 398 611 466
Jumlah	811 416 083 274	9558532791967	1 318 229 375 929	11 688 178 251 170
Sumatera Barat	1 284 980 243 000	1054459770000	578 415 210 000	2 917 855 223 000
Seluruhnya	2 096 396 326 274	10612992561967	1 896 644 585 929	14 606 033 474 170

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Semua APBD daerah kabupaten lebih tinggi dibanding daerah kota (selain Kota Padang). APBD paling besar di daerah kabupaten dari sisi penerimaan adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nilai sebesar 867,36 milyar rupiah. Selanjutnya yang paling rendah adalah APBD di Kabupaten Solok Selatan dengan nilai 474,41 milyar rupiah. Untuk semua daerah kabupaten/Kota, pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana perimbangan.

Daerah yang memiliki PAD terbesar di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang adalah kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar dengan nilai PAD-nya masing-masing sebesar 49,19 milyar rupiah dan 48,78 milyar rupiah. Pada urutan berikutnya ditempati oleh kabupaten Dharmasraya dengan PAD sebesar 45,20 milyar rupiah. Sedangkan daerah yang memiliki PAD paling rendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 15,10 milyar rupiah.

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2011 lebih

rendah dibanding pendapatan pemerintah daerah. Di tahun tersebut pendapatan daerah kabupaten/kota berjumlah 10,92 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 10,63 triliun rupiah.

Realisasi APBD Kota Padang tahun 2011 baik ditinjau dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran tetap paling besar dibanding daerah kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2011 realisasi pendapatan tercatat sebesar 1,23 milyar rupiah, sedangkan belanja daerah mencapai 1,18 milyar rupiah.

Selain Kota Padang, secara umum pendapatan dan belanja daerah kabupaten jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah kota. Kabupaten-kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah yang termasuk tinggi antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Ketiga kabupaten tersebut memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah di atas 700 milyar. Sedangkan kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah yang termasuk rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan

Solok Selatan dengan pendapatan dan belanja daerah berkisar pada angka 400 milyar.

Sementara itu APBD dari sisi penerimaan yang paling rendah dicatat oleh Kota Solok dengan nilai pendapatan sebesar 353,06 milyar rupiah. Namun untuk belanja yang paling kecil terdapat pada Kota Padang Panjang yaitu sebesar 345,66 milyar rupiah.

Belanja daerah di wilayah kabupaten memperlihatkan jumlah yang cukup bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2011

kabupaten yang mempunyai realisasi pendapatan dan belanja daerah terbesar adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun tersebut realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 791,55 milyar rupiah, sedangkan realisasi belanja daerah kabupaten tersebut sebesar 776,82 milyar rupiah. Sementara itu daerah kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah paling rendah adalah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai berturut-turut sebesar 431,34 milyar dan 396,29 milyar rupiah.




Tabel 5.3.
Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, 2011 (Rp.)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah		
			Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. Kabupaten					
1. Kep. Mentawai	434 903 941 180	454 383 370 031	223 511 269 578	232 325 620 488	232 325 620 488
2. Pesisir Selatan	791 551 916 000	776 815 536 000	60 657 422 000	75 393 802 000	67 629 566 000
3. Solok	659 014 642 490	640 519 018 906	51 194 832 881	69 690 456 465	65 453 351 224
4. Sijunjung	545 775 043 016	525 326 274 820	61 657 889 235	58 310 636 932	55 566 636 932
5. Tanah Datar	673 726 801 000	661 965 778 000	66 283 461 000	78 044 484 000	69 147 123 000
6. Pdg pariaman	750 661 911 100	714 299 613 833	51 698 158 100	88 060 455 367	87 571 666 367
7. Agam	740 469 191 919	772 088 014 355	59 727 965 520	28 109 143 084	25 130 244 084
8. 50 Kota	693 724 037 000	670 843 018 000	46 865 157 000	69 746 176 000	67 019 378 000
9. Pasaman	580 135 994 707	540 946 928 889	43 503 612 590	82 692 678 408	57 520 839 859
10. Solok Selatan	431 336 781 739	396 294 925 853	31 005 636 507	66 047 492 393	65 414 492 393
11. Dharmasraya	505 671 150 964	478 352 253 109	44 421 303 329	71 740 201 184	71 740 201 184
12. Pasaman Barat	594 581 373 530	557 397 959 880	49 587 880 670	86 771 294 320	85 048 332 320
B. Kota					
71. Padang	1 227 075 541 756	1 182 346 196 659	46 923 210 909	91 652 556 006	86 327 657 006
72. Solok	353 058 001 475	357 351 554 494	103 950 316 912	99 656 763 893	96 813 010 894
73. Sawahlunto	390 081 005 172	358 001 822 422	33 160 893 632	65 240 076 382	61 936 076 382
74. Padang Panjang	346 763 822 000	345 658 225 000	56 155 812 000	54 261 409 000	53 436 510 000
75. Bukittinggi	401 454 058 463	412 145 716 261	65 622 525 392	54 930 867 594	52 619 321 081
76. Payakumbuh	401 222 858 704	386 902 326 806	27 711 447 901	42 031 979 799	40 355 129 799
77. Pariaman	403 242 501 246	401 104 657 741	119 581 454 461	121 719 297 966	120 240 297 966
Jumlah	10 924 450 573 460	10 632 743 191 059	1 240 220 249 618	1 536 425 391 281	1 461 295 454 979
Prov. Sumbar	2 071 161 196 000	2 325 704 271 000	211 585 495 480	74 479 901 487	48 079 901 487
Seluruhnya/	12 995 611 769 460	12 958 447 462 059	1 451 805 745 098	1 610 905 292 768	1 509 375 356 466

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat



PERBANKAN

-  **STRUKTUR PERBANKAN**
-  **PENGHIMPUNAN DANA BANK**
-  **POSISI KREDIT PERBANKAN**

Sampai saat ini kinerja perbankan masih menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Selama periode 2012 industri perbankan mencatat kinerja yang cukup baik, secara kuantitas ataupun kualitas dan menunjukkan *trend* positif. Hal ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan dukungan regulasi terhadap industri, sehingga pencapaian di tahun tersebut bisa maksimal.

Walaupun dibayang-bayangi oleh krisis globalisasi yang masih melanda dunia, perbankan nasional masih bisa mencatat kinerja yang sangat baik. Keadaan ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang juga semakin membaik. Perkembangan positif pada perbankan ini tidak hanya terdapat pada bank umum, namun juga pada perbankan syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sayangnya prestasi itu tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan perbankan dalam mengucurkan kredit sehingga kurang berperan dalam menggerakkan perekonomian negeri ini. Hasil riset Morgan Stanley menunjukkan bahwa peran perbankan Indonesia hanya sebesar 26 persen dari PDB nasional. Sementara itu

perbankan Cina dan India bisa berperan hingga 60 persen dari PDB negaranya.

Ada beberapa hal yang jadi penyebab kurang lancarnya kredit perbankan. Salah satunya adalah belum pulihnya kondisi perekonomian di pasca krisis global 2008. Hal ini berakibat pada berkurangnya permintaan kredit. Di samping itu, sektor riil sendiri sebagai pihak debitur belum maksimal dalam menggunakan dana yang didapat dari perbankan. Hal ini diduga karena sektor riil menjaga dananya, dan tidak menggunakannya dengan optimal, sehingga belum membutuhkan dana tambahan dan mengajukan kredit ke bank. Penyebab lain minimnya pertumbuhan kredit adalah tingkat suku bunga yang masih tinggi.

Krisis finansial global yang menyebabkan kurang lancarnya kredit perbankan terutama sekali dilakukan dengan jalan mengerem laju pertumbuhan kredit menengah dan korporasi, namun sebaliknya meningkatkan portofolio di segmen ritel dan mikro. Sektor UKM diyakini mampu bertahan terhadap krisis. Bank banyak yang agresif melakukan ekspansi di sektor mikro.

Sementara itu kondisi perbankan umum di Sumatera Barat masih menunjukkan perkembangan positif, meskipun secara umum perkembangan penyaluran kredit masih relatif terbatas dan juga mengalami perlambatan. Disisi lain perkembangan bank umum syariah menunjukkan perkembangan yang terus menggeliat. Walau asetnya masih kecil, bank syariah secara nasional menunjukkan pertumbuhan pesat yaitu lebih dari 30%. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan keuangan syariah global

6.1. Struktur Perbankan

Berdasarkan kegiatan usaha, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang masing-masing dirinci lagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut jenisnya bank umum konvensional

dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja. Dari segi kepemilikannya, bank umum terdiri dari bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional dan bank asing/campuran.

Pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor bank yang ada. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 6.1.
Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2010-2012

Jenis Bank	2010		2011		2012	
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Bank Konvensional	122	473	119	620	119	650
1. Bank Umum	19	320	20	381	21	401
1.1. Bank Umum Devisa	14	212	16	344	17	364
1. Bank Pemerintah	3	166	3	195	3	208
2. BPD	-	-	1	89	1	93
3. Bank Swasta Nasional	11	46	11	59	12	62
4. Bank Asing & Campuran	-	-	1	1	1	1
1.2. Bank Umum Non Devisa	5	108	4	37	4	37
1. Bank Pemerintah	1	5	1	7	1	7
2. BPD	1	78	-	-	-	-
3. Bank Swasta Nasional	3	25	3	30	3	30
4. Bank Asing & Campuran	1	1	-	-	-	-
2. Bank Perkreditan Rakyat	103	153	99	239	98	249
BPR	103	153	99	239	98	249
II. Bank Syariah	14	60	17	75	16	84
1. Bank Umum	6	34	8	41	7	47
2. Bank Umum Unit Usaha Syariah	2	4	2	5	2	7
3. Bank Perkreditan Rakyat	6	22	7	29	7	30
Jumlah	136	533	136	695	135	734

Sumber : Bank Indonesia Cabang Padang

Jumlah bank pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Barat berkurang satu bank dibanding dengan kondisi pada tahun 2011, yaitu dari jumlah 136 menjadi 135 bank. Namun kantor

bank justru makin meningkat jumlahnya, yaitu dari 695 menjadi 734 kantor atau artinya pada tahun tersebut terjadi penambahan kantor sebanyak 39 buah atau meningkat 5,61 persen.

Kantor bank disini mencakup kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu.

Secara total jumlah bank di Sumatera Barat pada tahun 2012 berkurang dibanding dengan tahun sebelumnya dan bila dilihat yang berkurang itu adalah jenis bank syariah yang berkurang dari 17 menjadi 16 bank, sedangkan bank konvensional jumlahnya tetap, yakni sebanyak 119 bank. Namun pada bank konvensional ini terjadi juga perubahan jumlah bank, yaitu bank umum bertambah satu bank (dari 20 menjadi 21 bank). Penambahan ini terjadi akibat dari bertambahnya 1 bank swasta nasional di Sumatera Barat. Sementara itu BPR berkurang satu bank (dari 99 menjadi 98 bank).

Peningkatan jumlah kantor bank di Sumatera Barat terjadi pada kedua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Peningkatan kedua jenis bank ini terdapat dalam jumlah yang cukup banyak, dimana kantor bank konvensional meningkat dari 620 kantor bank di tahun 2011 menjadi 650 kantor bank di tahun 2012. Bila

dirinci lebih lanjut peningkatan ini terjadi pada bank umum devisa dan BPR. Pada bank umum devisa kantor bank meningkat dari 344 menjadi 364 bank, sedangkan pada bank umum non devisa jumlahnya tetap sementara itu BPR bertambah jumlahnya dari 239 menjadi 249 kantor bank. Demikian juga peningkatan jumlah kantor bank syariah terdapat dalam jumlah yang signifikan juga, yaitu dari 75 kantor bank di tahun 2011 menjadi 84 kantor bank di tahun 2012.

Yang dimaksud dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

Berkurangnya jumlah bank BPR di tahun 2012 ternyata tidak dialami oleh bank syariah. Dari segi jumlah bank syariah di Sumatera Barat sampai dengan tahun 2012 makin bertambah, dan peningkatan ini juga

seiring dengan jumlah kantor bank. Bank syariah yang dikelompokkan atas bank umum, bank umum unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat (BPR) masing-masingnya pada tahun 2012 berjumlah 7, 2 dan 7 bank. Peningkatan jumlah pada bank syariah ini terjadi pada bank umum dan BPR dimana di tahun 2011 masing-masingnya sama-sama baru berjumlah 6 bank.

Perkembangan yang mengembirakan pada bank syariah ini juga terdapat pada jumlah kantor bank yang menunjukkan peningkatan di tahun 2012. Pada tahun 2010 jumlah kantor bank syariah adalah sebanyak 60 kantor, tahun 2011 meningkat menjadi 75 kantor, dan selanjutnya di tahun 2012 menjadi 84 kantor. Peningkatan jumlah kantor ini terjadi pada ketiga jenis bank syariah, dimana pada bank umum syariah kantor bank meningkat jumlahnya dari 41 di tahun 2011 menjadi 47 kantor bank atau bertambah 13 kantor pada tahun 2012. Pada bank umum unit usaha syariah tahun 2011 terdapat 5 kantor sedangkan tahun 2012 menjadi 7 kantor bank. sedangkan jumlah kantor bank pada BPR syariah terjadi

pertambahan jumlah kantor bank dari 29 menjadi 30 kantor bank. Bank syariah atau bank islam adalah bank yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Alquran, As Sunnah, dan lain-lain). Secara operasional bank syariah dijabarkan sebagai bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan bunga. Kondisi ini tentu membuka peluang untuk berkembangnya bank syariah di Sumatera Barat yang merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

6.2 Penghimpunan Dana Bank

Jenis Simpanan yang terdapat pada Bank Umum ada tiga macam, yaitu berupa giro, simpanan berjangka dan tabungan. Sedangkan pada BPR mencakup simpanan berjangka dan tabungan. Penghimpunan dana oleh bank dari masyarakat atau pihak ketiga terdapat dalam dua bentuk, yaitu berbentuk rupiah dan valuta asing (valas).

Sampai keadaan tahun 2012 perbankan di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun tersebut tercatat 25,79 triliun

rupiah dana masyarakat dihimpun bank, baik dalam bentuk Rupiah ataupun Valuta Asing, Dibanding keadaan tahun sebelumnya dimana dana masyarakat yang dihimpun berjumlah 25,79 triliun rupiah, telah terjadi peningkatan penghimpunan dana bank sebesar 9,65 persen. Peningkatan pada tahun 2012 ini lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan peningkatan 2011 yang tercatat sebesar 8,12 persen, dimana dana yang dihimpun bank pada tahun 2010 adalah 21,75 triliun rupiah.

Simpanan masyarakat Sumatera Barat di bank dalam bentuk rupiah masih lebih dominan dibanding bentuk valuta asing. Pada tahun 2012 simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah mencapai 25,20 triliun rupiah atau 97,72 persen dari total simpanan. Selanjutnya penghimpunan dana

masyarakat dalam bentuk rupiah lebih banyak terdapat pada bank pemerintah. Pada tahun 2012 bank pemerintah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk rupiah sebesar 18,62 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 16,57 triliun rupiah. Sedangkan bank swasta nasional pada tahun 2012 menghimpun dana masyarakat dalam bentuk rupiah sebanyak 5,62 triliun rupiah.

Secara total penghimpunan dana masyarakat oleh bank dalam bentuk valuta asing di tahun 2012 berjumlah 587,44 milyar rupiah. Jumlah ini berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 tercatat 643,58 milyar simpanan masyarakat dalam bentuk valuta asing, sedangkan di tahun 2011 terkumpul sebanyak 623,84 milyar rupiah.

Tabel 6.2.
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR
di Sumatera Barat, 2010-2012 (juta rupiah)

Jenis Bank/Jenis Simpanan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Rupiah</u>	21 106 876	22 893 151	25 204 844
Bank Pemerintah *)	15 825 169	16 570 425	18 618 694
Bank Swasta nasional	4 463 648	5 421 008	5 618 960
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	818 059	901 719	967 191
Valuta Asing	643 584	623 842	587 437
Bank Pemerintah *)	242 651	264 055	274 623
Bank Swasta nasional	400 734	359 766	312 814
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	-	-	-
Rupiah Valuta Asing	21 750 460	23 516 993	25 792 282
Bank Pemerintah *)	16 066 019	16 634 480	18 893 318
Bank Swasta nasional	4 864 382	5 780 794	5 931 774
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	818 059	901 719	967 191
Sumber	: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat Bank Indonesia Cabang Padang		
Keterangan	: *) Mencakup BPD		

Penghimpunan dana dalam bentuk valuta asing ini dilakukan oleh dua kelompok bank, yaitu bank pemerintah dan bank swasta nasional, sedangkan pada bank asing dan bank campuran serta bank BPR tidak ada pengumpulan dana dalam bentuk valuta asing. Penghimpunan dalam bentuk valuta asing pada bank swasta

nasional lebih besar dibanding pada bank pemerintah, dimana di tahun 2012 masing-masingnya menghimpun sebesar 312,81 milyar dan 274,62 milyar rupiah. Bila dibandingkan antara kedua kelompok bank ini, dalam penyimpanan dana masyarakat berbentuk valuta asing ternyata bank swasta nasional memang selama ini

lebih besar jumlahnya dibanding bank pemerintah. Keadaan ini berlangsung sejak awal periode data atau pada tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat 400,73 milyar rupiah dana berbentuk valuta asing yang dihimpun bank swasta nasional, sedangkan bank pemerintah menghimpun 242,65 milyar rupiah. Di tahun 2011 pada bank pemerintah tercatat sebanyak 264,06 milyar rupiah sedangkan pada bank swasta nasional sudah mencapai 359,77 milyar rupiah.

6.3 Posisi Kredit Perbankan

6.3.1 Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan

Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh pihak perbankan di Sumatera Barat juga diiringi oleh peningkatan pemberian kredit. Secara total pinjaman yang diberikan perbankan dalam bentuk rupiah dan valuta asing di tahun 2012 meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun tersebut peningkatan hanya terjadi pada kredit rupiah namun dalam bentuk valuta asing mengalami penurunan. Selanjutnya pinjaman dalam bentuk rupiah lebih banyak

digunakan untuk konsumsi, berbeda dengan pinjaman valuta asing yang lebih banyak digunakan untuk investasi.

Jumlah pinjaman yang disalurkan pihak bank selama tahun 2012 adalah sebesar 35,04 triliun rupiah. Selama periode 2010-2012 terlihat *trend* yang meningkat dalam pemberian pinjaman ini, dimana di tahun 2010 baru mencapai 22,38 triliun rupiah dan di tahun 2011 meningkat menjadi 30,35 triliun rupiah. Bila dilihat menurut jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, kredit yang paling banyak dimanfaatkan tergolong pada penggunaan untuk konsumsi. Tercatat pada tahun 2012 sebesar 16,04 triliun rupiah merupakan pinjaman untuk konsumsi. Pada urutan berikutnya adalah untuk modal kerja sebesar 13,59 triliun rupiah. Penggunaan untuk investasi merupakan jenis penggunaan yang paling sedikit, yaitu senilai 5,41 triliun rupiah.

Seperti halnya pada penghimpunan dana masyarakat, pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk rupiah merupakan bentuk yang

lebih besar dibanding yang berbentuk valuta asing. Pada tahun 2012 pinjaman yang diberikan bank yang berbentuk rupiah adalah sebesar 33,76 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 29,03 triliun rupiah. Peningkatan pinjaman ini terjadi pada ke tiga jenis penggunaan. Pinjaman dalam bentuk rupiah paling banyak digunakan untuk konsumsi. Pada tahun 2012 pinjaman untuk konsumsi mencapai angka 16,04 triliun rupiah. Sedangkan yang paling kecil digunakan untuk investasi yang di tahun 2012 tercatat sebesar 4,69 triliun rupiah, sedangkan pinjaman untuk modal kerja tercatat sebesar 13,03 triliun rupiah.

Pinjaman yang diberikan perbankan yang berbentuk valuta asing di tahun 2010-2012 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 pinjaman berbentuk valuta asing tercatat sebesar 1,06 triliun rupiah, di tahun 2011 meningkat menjadi 1,32

triliun rupiah, namun di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,28 triliun rupiah. Berkurangnya pemberian kredit dalam bentuk valuta asing selama tahun 2012 terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada tahun 2012 pinjaman valuta asing untuk modal kerja adalah sebesar 559,35 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2011 tercatat sebesar 577,94 milyar rupiah. Sedangkan penggunaan untuk investasi tercatat di tahun 2012 sebesar 719,83 milyar rupiah, atau merupakan penggunaan terbesar pada kelompok ini, namun di tahun 2011 tercatat sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 742,65 milyar rupiah. Selanjutnya pinjaman valuta asing untuk konsumsi pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 pinjaman dalam bentuk valuta asing yang digunakan untuk konsumsi sudah mencapai 4,41 milyar rupiah, di tahun 2011 berkurang menjadi 4,20 milyar rupiah, dan pada tahun 2012 berkurang sangat drastis menjadi 114 juta rupiah.

Tabel 6.3.
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta asing menurut jenis penggunaan di Sumatera Barat 2010-2012 (juta rupiah)

Rincian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah	21 316 960	29 029 639	33 764 779
1. Modal Kerja	7 732 682	10 649 951	13 035 463
2. Investasi	3 758 986	4 309 602	4 688 213
3. Konsumsi	9 825 292	14 070 085	16 041 102
Valuta Asing	1 064 613	1 324 790	1 279 299
1. Modal Kerja	282 988	577 940	559 350
2. Investasi	777 217	742 652	719 835
3. Konsumsi	4 408	4 199	114
Jumlah	22 381 574	30 354 429	35 044 078
1. Modal Kerja	8 015 671	11 227 891	13 594 813
2. Investasi	4 536 203	5 052 254	5 408 049
3. Konsumsi	9 829 700	14 074 284	16 041 216

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat
Bank Indonesia Padang

Sementara itu kredit yang khusus diberikan oleh bank kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2012 secara kuantitas jauh lebih kecil dibanding pinjaman untuk yang bukan UMKM. Penggunaan kredit untuk UMKM ini juga dikelompokkan atas tiga, yaitu yang penggunaannya untuk modal kerja, investasi, dan yang tidak teridentifikasi.

Pada tahun 2012 tercatat sebesar 10,66 triliun rupiah kredit

yang telah disalurkan oleh pihak perbankan Sumatera Barat kepada UMKM. Kondisi tahun tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,72 triliun rupiah. Pinjaman untuk UMKM ini penggunaannya hanya untuk dua jenis, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Penggunaan terbesar di tahun 2012 tersebut dari kredit yang diberikan bank di Sumatera Barat adalah untuk modal kerja (8,85 triliun rupiah), yang diikuti

oleh untuk investasi sebesar 1,81 triliun rupiah.

Kredit Untuk UMKM yang diberikan perbankan di Sumatera Barat sebagian besar disalurkan melalui bank pemerintah. Pada tahun 2012 sebanyak 8,42 triliun rupiah kredit dikucurkan untuk UMKM atau ini sekitar 78,99 persen dari total kredit UMKM. Dan sebagian besar kredit dari bank pemerintah itu digunakan untuk investasi yang mencapai 7,38 triliun rupiah, sisanya adalah untuk investasi sebesar 1,06 triliun rupiah.

Bank swasta nasional di Sumatera Barat selama tahun 2012 memberikan kredit kepada UMKM dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding bank pemerintah, namun juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sebesar 2,23 triliun rupiah kredit telah disalurkan oleh bank swasta nasional, sementara itu di tahun

2011 tercatat kredit untuk UMKM sebanyak 1,54 triliun rupiah. Sebagaimana penyaluran kredit oleh bank pemerintah, pada bank swasta nasional penggunaan kredit UMKM terbanyak juga untuk modal kerja. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 1,49 triliun rupiah kredit UMKM untuk modal kerja dikucurkan bank swasta nasional, sedangkan untuk investasi adalah sebesar 748,13 milyar rupiah.

Bank asing dan bank campuran menyalurkan kredit perbankan kepada usaha kecil, mikro dan menengah dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding kelompok bank pemerintah dan bank swasta nasional. Pada tahun 2012 bank asing dan bank campuran telah menyalurkan kredit sebesar 5,59 milyar rupiah, yang terbagi atas kredit untuk modal kerja sebesar 2,91 milyar rupiah dan untuk investasi sebanyak 2,68 milyar rupiah.

Tabel 6.4.
Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Diberikan menurut
Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat 2010-2012
(jutaan rupiah)

Rincian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Bank Pemerintah ^{*)}	-	7 175 482	8 422 483
1. Modal Kerja	-	6 177 507	7 384 375
2. Investasi	-	997 975	1 058 107
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
II. Bank Swasta Nasional	-	1 541 148	2 234 536
1. Modal Kerja	-	1 045 884	1 486 410
2. Investasi	-	495 264	748 126
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
III. Bank Asing dan Bank Campuran	-	4 339	5 592
1. Modal Kerja	-	2 304	2 914
2. Investasi	-	2 035	2 678
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah		8 720 969	10 662 611
1. Modal Kerja	-	7 225 694	8 853 699
2. Investasi	-	1 495 275	1 808 911
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Sumatera Barat Maret 2012
Bank Indonesia Padang

6.3.2 Posisi Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Sektor perdagangan merupakan sektor yang mendapat alokasi kredit terbesar yang diberikan perbankan di Sumatera Barat. Sektor

perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 21,19 persen, ternyata bisa mendapatkan kredit perbankan lebih besar dibanding sektor lain. Pada tahun 2012 kredit yang berupa rupiah dan valuta asing yang diperoleh sektor perdagangan ini adalah sebesar 8,85

triliun rupiah. Dibanding dengan tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup besar, dimana pada tahun tersebut kredit yang diterima pada sektor perdagangan adalah sebesar 6,71 triliun rupiah.

Sektor ekonomi lainnya yang menyerap kredit perbankan dalam jumlah

yang juga relatif besar adalah sektor pertanian. Sebagai sektor tempat bergantung 40,60 persen penduduk Sumatera Barat, sektor pertanian pada tahun 2012 berhasil mendapat kredit perbankan sebesar 3,60 triliun rupiah. Nilai kredit ini meningkat dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 3,24 triliun rupiah.

Tabel 6.5.
Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing menurut Lapangan Usaha di Sumatera Barat, 2011-2012 (jutaan rupiah)

Sektor Ekonomi	Rupiah dan Valas		Rupiah	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	16 280 145	19 002 862	14 959 554	17 723 677
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3 241 324	3 595 670	3 100 070	3 460 569
Pertambangan dan Penggalian	320 014	380 415	272 672	324 829
Industri Pengolahan	2 422 372	2 704 375	1 336 120	1 668 161
Listrik, Gas & Air Bersih	6 234	22 967	6 234	22 967
Konstruksi	308 466	448 016	308 466	448 016
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6 708 050	8 853 919	6 662 107	8 801 633
Pengangkutan dan Komunikasi	358 676	463 492	358 676	463 492
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	636 407	810 555	636 407	810 555
Jasa-Jasa	2 278 603	1 723 454	2 278 603	1 723 454
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	14 074 284	16 041 216	14 070 085	16 041 102
Rumah Tinggal	2 048 130	2 226 905	2 048 130	2 226 905
Flat dan Apartemen	8 553	65 829	8 553	65 829
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	124 763	151 522	124 763	151 522
Kendaraan Bermotor	2 482 111	2 038 244	2 482 111	2 038 244
Lainnya	9 410 726	11 558 716	9 406 527	11 558 602
Jumlah	30 354 429	35 044 078	29 029 639	33 764 779

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Maret 2012

Sementara itu sektor yang paling kecil menyerap kredit perbankan di Sumatera Barat adalah sektor Listrik, Gas dan Air, baik pada tahun 2011 ataupun pada tahun 2012. Berturut-turut nilai kredit yang diterima sektor tersebut pada kedua tahun tersebut adalah 6,23 milyar rupiah dan 22,97 milyar rupiah.

Selanjutnya pinjaman yang diberikan pihak bank berdasarkan bukan lapangan usaha di tahun 2012 terbanyak ternyata digunakan untuk kredit rumah tinggal. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2011, kredit untuk kendaraan bermotor sedikit lebih tinggi dibanding kredit untuk rumah tinggal. Pada tahun 2012 kredit rumah tinggal tercatat sebesar 2,23 triliun rupiah, sedangkan untuk kendaraan bermotor sebesar 2,04 triliun rupiah. Sebaliknya di tahun 2011 kredit untuk rumah tinggal sebesar 2,05 triliun rupiah dan untuk kendaraan bermotor sebesar 2,48 triliun rupiah.

Untuk kredit yang telah diberikan selama ini oleh bank-bank di Sumatera Barat pada usaha mikro, kecil, dan menengah ternyata juga yang utama adalah sektor

perdagangan. Dari total kredit yang diterima usaha mikro, kecil, dan menengah di tahun 2012 yang tercatat sebesar 10,66 triliun rupiah, ternyata sebanyak 6,35 triliun rupiah atau 59,57 persen dari total berhasil diserap oleh sektor perdagangan.

Dalam hal penyerapan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat kondisi yang belum menggembirakan pada sektor pertanian. Sektor yang merupakan tumpuan sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat ternyata belum banyak bisa menyerap kredit dari perbankan. Pada tahun 2012 usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pertanian hanya menerima kredit dari bank sebesar 1,40 triliun rupiah. Ini berarti kredit sektor pertanian untuk usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah hanya 13,13 persen dari kredit yang diterima usaha mikro, kecil dan menengah secara keseluruhan. Namun dibanding tahun 2011 hal tersebut sudah mengalami peningkatan yang menggembirakan, dimana pada tahun tersebut tercatat 929,63 milyar yang disalurkan untuk UMKM sektor

pertanian atau sekitar 10,66 persen dari keseluruhan kredit UMKM.

Tabel 6.6.
Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2010-2012 (jutaan rupiah)

Sektor	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-	929 627	1 405 470
Pertambangan dan Penggalian	-	80 409	186 109
Industri Pengolahan	-	285 366	398 588
Listrik, Gas & Air Bersih	-	5 333	10 428
Konstruksi	-	244 553	319 828
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-	4 717 028	6 346 464
Pengangkutan dan Komunikasi	-	235 043	319 822
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	-	577 577	899 579
Jasa-Jasa	-	1 645 815	776 322
Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah		8 720 969	10 662 611

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat Maret 2012
Bank Indonesia Kantor Cabang Padang



PENDUDUK

- ☞ **PENDUDUK MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KEL. UMUR**
- ☞ **PENDIDIKAN**
- ☞ **KETENAGAKERJAAN**
- ☞ **PENDUDUK BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA UTAMA**
- ☞ **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Kependudukan merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Data kependudukan dengan berbagai karakteristiknya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah perencanaan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu daerah atau negara dapat diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk.

Pertambahan penduduk secara tidak langsung akan menimbulkan efek, baik efek positif maupun negatif. Dari sisi negatif, bertambahnya penduduk akan menghambat pembangunan karena semakin besar jumlah penduduk, maka pendapatan perkapita masyarakat suatu daerah akan semakin kecil dan juga menambah masalah sosial ketenagakerjaan (masalah perumahan, kriminalitas, lapangan pekerjaan dan lain-lain). Dari sisi positif, bertambahnya penduduk akan memacu pembangunan dimana kegiatan produksi akan terus berlangsung berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Konsumsi dari barang-barang tersebut yang nantinya akan memacu kegiatan ekonomi dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.

Tidak semua penduduk dapat berperan sebagai pemacu pembangunan. Dalam membangun suatu daerah diperlukan sumber daya manusia yang andal atau mempunyai kemampuan/*skill* yang tinggi. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kemampuan yang

memadai hanya akan menambah permasalahan ketenagakerjaan.

Setiap tahunnya jumlah penduduk Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Walaupun setiap tahun penduduk bertambah, namun laju pertumbuhan jumlah penduduk memperlihatkan kecenderungan mengalami penurunan. Keadaan ini sudah terlihat sejak awal periode dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk adalah 4.729.558 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,30 persen. Di tahun 2009 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,29 persen terdapat jumlah penduduk sebesar 4.790.621 jiwa. Selanjutnya hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010) didapatkan bahwa pada tahun tersebut jumlah penduduk sudah mencapai 4.846.909. Sedangkan pada tahun 2011 penduduk Sumatera Barat mencapai 4.904.460 dan laju pertumbuhan sebesar 1,02 persen atau merupakan pertumbuhan penduduk terendah pada periode tahun 2008-2012. Pada tahun 2012 penduduk Sumatera Barat sudah mencapai 4.957.719 jiwa dengan dengan laju pertumbuhan 1,09 persen.

Dibanding dengan keadaan pada awal periode data atau pada tahun 2008 telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 228.161 jiwa atau selama lima tahun ini terjadi pertambahan penduduk sebanyak 4,82 persen atau rata-rata 0,96 persen per tahun. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 244.215.983 jiwa, atau merupakan yang keempat terbesar dunia. Sementara itu penduduk Sumatera Barat pada tahun tersebut merupakan 2,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Selain karena adanya kelahiran dan kematian, perubahan penduduk Sumatera Barat akibat perpindahan penduduk keluar ataupun masuk wilayah Sumatera Barat cukup besar pengaruhnya dalam pertumbuhan penduduk. Hal ini akibat faktor kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Selanjutnya juga dengan adanya beberapa sekolah/ perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat di luar Sumatera Barat akan mendorong bertambahnya penduduk di Sumatera Barat.

Tabel 7.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2008–2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2008	4 729 558	1,30
2009	4 790 621	1,29
2010	4 846 909	1,17
2011	4 904 460	1,02
2012	4 957 719	1,09

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.1. Penduduk Menurut Jenis

Kelamin dan Kelompok Umur

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2012 di Sumatera Barat terdapat 2.455.782 jiwa penduduk laki-laki dan 2.501.937 jiwa penduduk perempuan. Dari keadaan ini terlihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Secara persentase, pada tahun tersebut terdapat 49,53 persen penduduk laki-laki dan 50,47 persen penduduk perempuan atau ratio antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 98,16.

Komposisi penduduk Sumatera Barat ditinjau menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur

15-64 tahun. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.152.416 jiwa atau 63,59 persen dari total penduduk merupakan penduduk berusia 15-64 tahun. Kelompok umur 15-64 tahun merupakan kelompok usia produktif, dimana dengan besarnya kelompok umur ini berakibat pada besarnya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang utama adalah perlunya kebutuhan pendidikan dan lapangan kerja yang besar.

Kebiasaan merantau yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat memberi dampak pada kelompok umur 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas dimana penduduk berjenis kelamin perempuan lebih

besar dibanding penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 15-64 tahun jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 1.555.331 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.597.085 jiwa.

Kondisi yang berbeda ditemui pada kelompok umur 0-14 tahun, dimana penduduk laki-laki pada usia tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Secara umum diketahui bahwa di dunia memang kelahiran bayi laki-laki lebih besar dibanding bayi perempuan. Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 penduduk laki-laki pada kelompok umur 0-14 tahun tercatat sebanyak 789.990 jiwa, sedangkan penduduk perempuan

sebanyak 744.648 jiwa. Secara total kelompok umur 0-14 tahun ini berjumlah 1.534.638 jiwa atau merupakan 30,95 persen dari keseluruhan penduduk Sumatera Barat.

Kelompok umur 65 tahun ke atas merupakan kelompok umur yang paling kecil jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Pada tahun 2012 kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 270.665 jiwa. Namun dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan berjumlah 160.204 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 110.461 jiwa.

Tabel 7.2.

**Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2012
(000)**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	789 990	32,17	744 648	29,76	1 534 638	30,95
15 – 64	1 555 331	63,33	1 597 085	63,83	3 152 416	63,59
65+	110 461	4,50	160 204	6,40	270 665	5,46
Jumlah	2 455 782	100,00	2 501 937	100,00	4 957 719	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.2. Pendidikan

Sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk Sumatera Barat masih belum terlalu baik. Hal ini dibuktikan dengan masih cukup besarnya persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah ataupun hanya memiliki ijazah pendidikan dasar, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi jumlahnya masih lebih kecil. Dewasa ini sampai dengan keadaan di tahun 2012 kondisi tersebut masih tetap sama.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mendapatkan bahwa pada tahun 2012 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak

memiliki ijazah mencapai 27,21 persen. Sedangkan yang mempunyai ijazah setingkat Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 23,74 persen. Untuk tingkat sekolah menengah, penduduk yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) lebih rendah dibanding yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), dimana masing-masingnya adalah 19,05 dan 22,57 persen. Dan penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II/II dan Diploma IV sampai S3 tercatat 2,61 dan 4,82 persen.

Tabel 7.3.
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2010– 2012 (%)

Ijazah yang Dimiliki	2010			2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk Punya	26.01	27.13	26.58	27.25	29.10	28,17	25,93	32,37	27,21
SD/MI	25.36	23.35	24.33	25.20	23.02	24,12	25,00	22,53	23,74
SMTp	19.82	20.28	20.06	19.02	17.90	18,46	19,55	18,56	19,05
SMTA	22.94	21.52	22.21	23.24	21.99	22,62	23,43	21,74	22,57
Dipl I/II/III	2.15	3.50	2.84	1.63	3.51	2,57	1,78	3,41	2,61
DIV sd S3	3.72	4.22	3.98	3.64	4.47	4,06	4,31	5,30	4,82
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Dewasa ini permasalahan gender masih merupakan masalah yang menjadi perhatian, baik di Indonesia khususnya maupun di dunia. Masih banyak anak tidak bisa bersekolah hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun di Sumatera Barat ternyata tidak demikian, karena tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara tingkat pendidikan penduduk laki-laki dengan perempuan. Perempuan di daerah ini diberi kesempatan yang

sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu, bahkan ternyata melebihi dari kaum laki-laki. Seperti ditemui sampai tingkat pendidikan tinggi, dimana pada tahun 2012 sebanyak 4,31 persen penduduk laki-laki mempunyai ijazah pendidikan pada tingkat DIV sampai dengan S3, sedangkan pada penduduk perempuan terdapat 5,30 persen pada tingkat pendidikan yang sama. Demikian juga untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III ternyata penduduk perempuan lebih banyak

memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut dibanding penduduk laki-laki, yaitu masing-masingnya sebesar 3,41 dan 1,78 persen.

7.3. Ketenagakerjaan

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mencatat bahwa pada tahun 2012 di Sumatera Barat terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 3.380,36 ribu orang. Penduduk usia 15 tahun ke atas ini dibedakan atas dua, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang memerlukan lapangan kerja. Tidak semua penduduk usia kerja tergolong ke dalam angkatan kerja. Ibu-ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa yang usianya 15 tahun ke atas tidak tergolong angkatan kerja. Dari Tabel 7.4 dan 7.5 diketahui bahwa jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja lebih banyak dibanding dengan yang bukan angkatan kerja.

Pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Barat penduduk yang termasuk pada angkatan kerja adalah

sebanyak 2.179,83 ribu jiwa, atau 64,47 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah angkatan kerja. Secara berturut-turut di tahun 2010 dan 2011 jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja sebanyak 2.194,04 ribu jiwa dan 2.213,51 ribu jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2012 terdapat 1.337,16 ribu penduduk laki-laki atau merupakan 81,22 persen dari penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas. yang termasuk pada angkatan kerja, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 842,66 ribu orang atau 48,58 persen dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas.

Bila dirinci lebih detil, angkatan kerja dikelompokan atas penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja di tahun 2012 tercatat sebanyak 2.037,64 ribu orang atau 60,27 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk pada kelompok

pengangguran di Sumatera Barat sebesar 142,18 ribu orang atau 4,21 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah dan angka pengangguran tersebut sudah mengalami penurunan, dimana di tahun 2011 banyaknya penduduk yang menganggur sebesar 142,79 ribu orang atau 4,27 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Masalah pengangguran perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Jumlah pengangguran

yang besar akan menimbulkan hal yang tidak baik untuk pembangunan, karena angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, antara lain ditandai oleh jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

Tabel. 7.4.

Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 – 2012 (%)

Kegiatan	2010			2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	82.11	51.42	66.36	83,56	49,69	66,19	81.22	48.58	64.47
Bekerja	77.59	46.72	61.74	78,42	46,24	61,92	76.35	45.00	60.27
Pengangguran	4.52	4.70	4.61	5,14	3,45	4,27	4.87	3.58	4.21
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	17.89	48.58	33.64	16,44	50,31	33,81	18.78	51.42	35.53
Sekolah	9.44	11.57	10.54	7,75	11,05	9,44	10.50	10.98	10.75
Mengurus RT	1.27	32.23	17.17	1,52	33,53	17,94	0.89	35.14	18.46
Lainnya	7.17	4.77	5.94	7,17	5,73	6,43	7.39	5.30	6.31
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berbeda dengan kelompok angkatan kerja, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja di tahun 2012 lebih tinggi dibanding tahun 2011. Pada tahun 2012 penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah 1.201,07 ribu orang, sementara itu di tahun 2011 berjumlah 1.130,84 ribu orang.

Pada kelompok bukan angkatan kerja penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2012 terdapat 891,88 ribu penduduk perempuan yang termasuk pada bukan angkatan kerja. Sebagian

besar kegiatan penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja ini adalah mengurus rumahtangga yang mencapai jumlah 609,53 ribu orang. Sementara itu penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bersekolah adalah sebanyak 190,48 ribu orang dan kegiatan lainnya sebanyak 91,87 ribu orang. Sedangkan penduduk laki-laki yang termasuk bukan kerja tercatat sebanyak 309,19 ribu orang, dengan rincian kegiatan 172,91 ribu orang sekolah, 14,68 ribu orang mengurus rumahtangga dan 121,60 ribu orang melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 7.5
Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010– 2012 (000 orang)

Kegiatan	2010			2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	1 321,28	872,76	2 194,04	1 361,07	852,44	2 213,51	1 137,16	842,66	2 179,82
Bekerja	1 248,51	792,95	2 041,45	1 277,40	793,32	2 070,72	1 257,02	780,62	2 037,64
Pengangguran	72,77	79,82	152,57	83,67	59,12	142,79	80,14	62,04	142,18
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	287,82	824,41	1 112,22	267,80	863,04	1 130,84	309,19	891,88	1 201,07
Sekolah	151,93	196,42	348,34	126,18	189,55	315,73	172,91	190,48	363,39
Mengurus RT	20,51	547,05	567,56	24,83	575,12	599,95	14,68	609,53	624,21
Lainnya	115,38	80,94	196,32	116,78	98,38	215,16	121,60	91,87	213,47
Jumlah	1 609,09	1 697,17	3 306,26	1 628,87	1 715,49	3 344,36	1 646,35	1 734,54	3 380,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Hasil Sakernas tahun 2012 mencatat bahwa penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat berjumlah 2.037.642 orang. Dibanding tahun sebelumnya, telah terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja, dimana pada tahun 2011 penduduk bekerja terdapat sebanyak 2.070.725 orang.

Sektor Pertanian masih merupakan sektor utama bagi

penduduk Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Walaupun saat ini peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat makin berkurang, sektor ini masih merupakan yang dominan dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, gas, dan air minum.

Tabel 7.6.

Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha Utama di Sumatera Barat Tahun 2011 dan 2012

Lapangan Usaha	2011		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	813 699	39,30	827 302	40,60
2. Pertambangan dan Penggalian	29 824	1,44	32 020	1,57
3. Industri Pengolahan	153 130	7,39	159 038	7,81
4. Listrik, Gas dan Air Minum	9 124	0,44	4 953	0,24
5. Bangunan	127 991	6,18	113 385	5,56
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	441 786	21,33	431 771	21,19
7. Pengangkutan dan Komunikasi	106 972	5,17	101 552	4,98
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40 489	1,96	41 694	2,05
9. Jasa Kemasyarakatan	347 710	16,79	325 927	16,00
Jumlah	2 070 725	100,00	2 037 642	100,00

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh Sektor Pertanian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2011 terdapat 813.699 orang (39,30 persen) yang bekerja di sektor pertanian, dan di tahun 2012 naik menjadi 827.302 ribu orang (40,60 persen).

Selain Sektor Pertanian, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa Kemasyarakatan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2012 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 431.771 orang (21,19 persen). Tenaga kerja pada sektor tersebut sedikit berkurang dibanding tahun 2011 yang berjumlah 441.786 orang (21,33 persen). Pada tahun 2012 sektor jasa kemasyarakatan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 325.927 orang (16,00 persen), namun menurun dibanding tahun 2011 yang berjumlah 347.710 orang (16,79 persen). Sedangkan sektor industri pengolahan yang diharapkan sebagai sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja ternyata sampai saat ini masih belum

mampu menyerap tenaga kerja yang besar di Sumatera Barat. Pada tahun 2012 baru 159.038 orang yang bekerja di sektor industri pengolahan atau hanya 7,81 persen dari total tenaga kerja.

7.5. Kesejahteraan Masyarakat

7.5.1. Pola Konsumsi Masyarakat

Salah satu ukuran untuk menentukan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui apabila pengeluaran untuk kebutuhan non makanan makin besar daripada pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat sampai saat ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding non makanan. Pada tahun 2012 pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat

adalah sebesar 696.422 rupiah. Dibanding tahun sebelumnya pengeluaran rata-rata ini sedikit lebih tinggi dimana pada tahun 2011 pengeluaran rata-rata per kapita tercatat sebesar 613.434 rupiah. Sementara itu nilai pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat tahun 2012 terdiri dari 394.351 rupiah merupakan pengeluaran untuk makanan dan 302.071 rupiah adalah pengeluaran untuk non makanan. Sedangkan di tahun 2011 pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan adalah sebesar 348.234 dan non makanan sebesar 265.200 ribu rupiah.

Walaupun terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Sumatera Barat, namun perbandingan persentase antara pengeluaran untuk makanan dan non makanan pada tahun 2011 dan 2012 hampir sama. Di tahun 2012 pengeluaran per kapita untuk makanan adalah sebesar 56,62 persen dan non makanan sebesar 43,37 persen. Pada tahun 2011 pengeluaran untuk makanan sebanyak 56,77 persen sedangkan non makanan adalah 43,23 persen.

Tabel 7.7.
Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat,
Tahun 2011 dan 2012

Jenis Pengeluaran	2011		2012	
	Nilai (rp)	%	Nilai (rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	348 234	56,77	394 351	56,62
Non Makanan	265 200	43,23	302 071	43,37
Jumlah Pengeluaran	613 434	100,00	696 422	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.5.1. Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan

7.5.1.1. Pemerataan Pendapatan

Peningkatan pendapatan penduduk di suatu wilayah belum dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat jika peningkatan pendapatan itu belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di samping peningkatan pendapatan masih diperlukan pemerataan pembagian pendapatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu dengan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (Gini Rasio).

Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk dibagi atas tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Sementara itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Jika kelompok

ini menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Namun, sebaliknya jika kelompok ini menerima antara 12 sampai dengan 17 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangannya dianggap sedang. Sementara itu jika kelompok ini menerima lebih dari 17 persen maka ketimpangan dianggap rendah.

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika indeks Gini menunjukkan angka kurang dari 0,30 maka pendapatan penduduk dikatakan cukup merata (ketimpangan rendah). Bila bernilai 0,30 sampai 0,50 berarti memiliki ketimpangan sedang, dan bila lebih dari 0,50 berarti memiliki ketimpangan tinggi.

Tabel 7.8.
Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2012

Tahun	Distribusi Pengeluaran			Gini Rasio
	40 % rendah	40 % sedang	20 % tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	21,45	39,31	39,24	0,30
2007	21,62	37,65	40,73	0,30
2009	23,26	39,38	37,36	0,30
2010	20,55	39,24	40,22	0,33
2011	26,15	40,08	33,77	0,33
2012	24,91	40,15	34,95	0,35

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Dari Tabel 7.8. diketahui bahwa persentase pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap seluruh pengeluaran penduduk dari tahun 2005 sampai tahun 2012 berada diatas 17 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat termasuk pada kriteria rendah.

Walaupun ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk kriteria rendah dengan angka yang berfluktuasi, namun terdapat kecendrungan bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah makin memperoleh distribusi pendapatan yang makin mengecil, terutama hal ini terlihat pada keadaan tahun 2010. Pada tahun 2005 kelompok tersebut mendapat distribusi pendapatan sebesar 21,45 persen,

namun di tahun 2010 hanya memperoleh bagian 20,55 persen, padahal pada tahun sebelumnya telah mencapai 23,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 kelompok 40 persen terendah mendapat distribusi pendapatan yang makin besar, yaitu 26,15 persen, dan pada tahun 2012 kembali berkurang menjadi 24,91 persen. Keadaan yang hampir sama juga ditemukan pada kelompok 40 persen yang mempunyai pendapatan sedang dan 20 persen berpendapatan tinggi yang cenderung berfluktuasi. Walaupun berfluktuasi, tapi terdapat kecenderungan distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen sedang makin lama makin meningkat sedangkan pada kelompok 20 persen tinggi semakin berkurang.

Berdasarkan pada indeks gini rasio selama tahun 2005-2012 ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk pada kriteria sedang. Walaupun masuk kriteria sedang, indeks gini rasio menunjukkan angka yang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan itu menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk makin lama

bertambah lebar. Selama tahun 2005 – 2009 tercatat indeks gini rasio sebesar 0,30, selanjutnya pada tahun 2010 dan 2011 indeks gini mencapai angka 0,33. Pada tahun 2012 indeks gini rasio mencapai angka tertinggi yakni sebesar 0,35. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya kewaspadaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar jangan kesenjangan pendapatan ini bertambah lebar karena kesenjangan tersebut akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan bisa meningkatkan angka kriminalitas.

7.5.2.2. Penduduk Miskin

1) Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomis. Ukuran yang dipakai adalah dengan metode *Head Count Index*, yang merupakan kemiskinan absolut.

Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut *garis kemiskinan*. Garis

kemiskinan ini merupakan nilai dari kebutuhan karena (dua) komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

2) Garis Kemiskinan

Standar kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah berbeda-beda. Standar kemiskinan antara daerah perkotaan dengan pedesaan juga berbeda. Perbedaan standar kemiskinan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perbedaan tingkat pendapatan, pola konsumsi maupun ketersediaan akan barang dan jasa. Tinggi rendahnya pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sedangkan pola konsumsi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya ketersediaan barang dan jasa. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka garis kemiskinan juga dibedakan antara garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan pedesaan.

Garis kemiskinan yang merupakan pembatas antara penduduk miskin dan yang tidak miskin di Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Pada tahun

2008 tercatat garis kemiskinan sebesar 195.733 rupiah, dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 mencapai angka 292.052 rupiah.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, ternyata daerah perkotaan memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada tahun 2012 garis kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 321.128 rupiah/kapita/bulan, sedangkan di pedesaan sebesar 273.655 rupiah/kapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan baik wilayah perkotaan maupun pedesaan menunjukkan pola yang sama dengan garis kemiskinan secara umum, yaitu menunjukkan nilai yang selalu meningkat. Pada tahun 2008 garis kemiskinan perkotaan berada pada angka 226.343 rupiah/kapita/bulan, atau pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan sebesar 41,88 persen, sedangkan di pedesaan pada tahun yang sama garis kemiskinan adalah 179.755 rupiah atau meningkat 49,21 persen di tahun 2012.

Tabel 7.9.
Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2008 – 2012
 (rupiah/kapita/bulan)

Daerah	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Perkotaan (K)	226 343	248 525	262 173	308 068	321 128
Pedesaan (D)	179 755	201 257	214 458	255 719	273 655
K + D	195 733	217 649	230 823	276 000	292 052

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

3) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sampai tahun 2009 penduduk miskin di Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan berkurang, namun setelah itu kembali meningkat jumlahnya. Pada tahun 2009 tersebut tercatat penduduk miskin sebesar 429,25 ribu orang, di tahun 2010 menjadi 430,02 ribu jiwa dan selanjutnya di tahun 2011 makin bertambah sebesar 441,80 ribu orang. Walaupun secara jumlah meningkat, namun penduduk miskin ini secara persentase pada tahun 2007 – 2011 mengalami pengurangan. Selanjutnya pada tahun 2012 penduduk miskin

makin berkurang, baik dalam jumlah maupun persentase. Pada tahun tersebut terdapat penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 397,86 ribu jiwa dan secara persentase merupakan 8,00 persen dari seluruh penduduk Sumatera Barat.

Secara jumlah ataupun persentase penduduk miskin lebih banyak terdapat di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Pada tahun 2012 terdapat 273,60 ribu penduduk miskin di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebanyak 124,25 ribu orang. Penduduk miskin di pedesaan ini mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

296,79 ribu orang. Kondisi yang sama di ditemui daerah perkotaan dimana jumlah penduduk miskin juga berkurang dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 145,01 ribu orang.

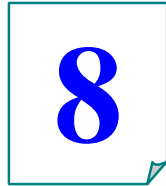
Lebih banyaknya penduduk miskin di pedesaan merupakan

fenomena yang wajar terjadi, mengingat penduduk di pedesaan jumlahnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Disamping itu kondisi pedesaan yang cenderung lebih tertinggal dan pola hidup yang lebih sulit dibanding perkotaan menjadikan penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dibanding perkotaan.

Tabel 7.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2008-2012

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan(D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	127,30	8,30	349,90	11,91	477,20	10,67
2009	115,78	7,50	313,48	10,60	429,25	9,54
2010	106,18	6,84	323,84	10,88	430,02	9,50
2011	145,01	7,61	296,79	9,85	441,80	8,99
2012	124,25	6,45	273,60	8,99	397,86	8,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat



PENUTUP

<https://sumberpns.go.id>

Kinerja perekonomian nasional yang membaik di tahun 2012 berpengaruh pula pada perekonomian Sumatera Barat. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi nasional umumnya ataupun Sumatera Barat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan Sumatera Barat ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 6,22 persen namun untuk nasional pertumbuhan ekonomi lebih rendah yaitu tercatat sebesar 6,46 persen dan. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 adalah sebesar 43,91 triliun rupiah.

Sepanjang tahun 2012 tercatat seluruh sektor yang ada mengalami pertumbuhan positif dengan sektor pertanian tetap merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat, dengan memberikan andil sebesar 23,01 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang berperan sebesar 18,45 persen dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat.

Sektor pengangkutan dan komunikasi walaupun bukan menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB, namun pada tahun 2012 sektor ini ternyata mempunyai laju pertumbuhan paling cepat diantara semua sektor, dimana sektor ini mampu tumbuh sebesar 9,03 persen. Pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibanding sektor lainnya adalah disebabkan karena perkembangan yang pesat pada sub sektor komunikasi di Sumatera Barat dewasa ini. Sedangkan peranannya dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah 15,89 persen.

Dilihat dari sisi permintaan keadaannya masih sama dengan tahun lalu, yaitu motor penggerak utama perekonomian di tahun 2012 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan memberikan kontribusi sebesar 52,86 persen pada pembentukan PDRB Sumatera Barat dari sisi penggunaan. Kontributor kedua adalah komponen ekspor barang-barang dan jasa dengan andil

sebesar 27,95 persen. Sedangkan komponen pembentukan modal tetap bruto berperan sebesar 20,21 persen.

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama tahun 2012 mengalami kenaikan 10,07 persen dari 20,18 juta rupiah di tahun 2011 menjadi 22,21 juta rupiah di tahun 2012. Demikian juga dengan pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku yang mengalami kenaikan dari 18,49 juta rupiah di tahun 2011 menjadi 20,28 juta rupiah tahun 2012.

Pada tahun 2012 inflasi sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut tercatat inflasi sebesar 4,16 persen sedangkan di tahun 2011 inflasi adalah 5,37 persen. Pada tahun 2009 inflasi pernah mencapai angka terendah selama dasawarsa terakhir ini, jauh lebih rendah dibanding tahun 2008 dimana angka inflasi yang terjadi di Kota Padang telah mencapai dua digit, yaitu sebesar 12,68 persen. Di tahun 2009 tersebut inflasi hanya berada pada angka 2,05 persen.

Perkembangan nilai ekspor Sumatera Barat kurang menggembirakan di tahun 2012 karena kinerja ekspor berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tercatat ekspor sudah mencapai 3,03 milyar US \$, sedangkan pada tahun 2012 ekspor berkurang menjadi 2,36 milyar US \$.

Komoditi ekspor utama Sumatera Barat sampai dengan keadaan tahun 2012 masih tetap dipegang oleh minyak kelapa sawit dimana komoditi ini mampu menyumbang sebesar 1,32 triliun US \$ atau 55,93 persen dari keseluruhan nilai ekspor. Komoditi lainnya yang juga mempunyai andil cukup besar yaitu karet remah yang diekspor senilai 702,78 juta US \$ serta minyak biji kelapa sawit berada di urutan ketiga dengan nilai sebesar 97,06 juta US \$. Sedangkan tiga negara tujuan ekspor utama Sumatera Barat adalah Amerika Serikat, India, dan Singapura.

Sementara itu nilai impor Sumatera Barat pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Di tahun 2011 impor hanya

bernilai 1,08 juta US, namun di tahun 2012 impor tercatat sebesar 1,24 milyar US \$. Pelabuhan Teluk Bayur tercatat sebagai pelabuhan utama sebagai tempat masuknya arus barang-barang ke Sumatera Barat. Pada tahun 2012 senilai 1,22 milyar US \$ atau sekitar 99,39 persen barang-barang diimpor melalui pelabuhan ini. Komoditi bernilai tertinggi yang diimpor ke Sumatera Barat adalah golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dsb dimana komoditi ini diimpor senilai 1,01 milyar US \$.

Neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor lebih besar daripada kinerja impor. Namun di tahun 2009 surplus neraca perdagangan mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercatat sebesar 998,01 juta US \$, padahal di tahun 2008 surplus usaha sudah mencapai 1,91 milyar US \$. Selanjutnya di tahun 2010 surplus neraca perdagangan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,46 milyar US \$. Peningkatan surplus ini berlanjut terus

di tahun 2011 menjadi 1,96 milyar US \$ sedangkan di tahun 2012 surplus perdagangan berkurang menjadi 1,12 milyar US \$.

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 lebih tinggi dibanding tahun 2011, pada tahun 2011 tercatat sebesar 2,18 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 2,92 triliun rupiah. Jika dibandingkan antara total penerimaan dengan total pengeluaran, total penerimaan di tahun 2012 lebih rendah dari pada total pengeluaran. Pada tahun 2012 tercatat realisasi belanja daerah sebesar 2,96 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2011 adalah 2,13 triliun rupiah.

Kota Padang merupakan daerah yang memiliki APBD paling besar. Pada tahun 2012 penerimaan daerah di Kota Padang mencapai 1,43 triliun rupiah. Hal ini dimungkinkan karena sebagai ibukota provinsi penerimaan PAD daerah ini paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, yaitu PAD Padang di tahun tersebut mencapai 202,96 milyar rupiah.

Selama tahun 2012 kondisi perbankan masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini direfleksikan oleh meningkatnya kredit dan permodalan bank, meskipun kondisi stabilitas makro ekonomi menghadapi tantangan yang berat akibat dari krisis finansial global. Pada tahun tersebut di provinsi Sumatera Barat terdapat 135 bank dengan kantor bank sebanyak 734 buah. Jumlah bank tersebut lebih banyak satu bank dibanding dengan keadaan tahun sebelumnya demikian juga jumlah kantor bank meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 695 kantor.

Walaupun pada tahun 2009 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa yang menelan korban meninggal melebihi 1000 jiwa, namun jumlah penduduk Sumatera Barat setiap tahunnya masih selalu mengalami peningkatan. Walaupun demikian, peningkatan jumlah penduduk tersebut menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Pada awal periode atau pada tahun 2008 tersebut jumlah penduduk adalah sebanyak 4.729.558 jiwa dengan laju

pertumbuhan 1,30 persen. Di tahun 2012 jumlah penduduk telah mencapai 4.957.719 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,09 persen.

Dilihat menurut jenis kelamin, di Sumatera Barat penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2012 terdapat 2.455.782 laki-laki dan 2.501.937 perempuan. Sedangkan menurut kelompok umur, di Sumatera Barat penduduk usia 15-64 tahun masih merupakan yang terbanyak jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Di tahun itu terdapat 3.152.416 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 63,59 persen dari total penduduk.

Tingkat pendidikan di Sumatera Barat masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki ijazah (27,21 persen) dan atau hanya mempunyai ijazah setingkat SD/MI (23,74 persen).

Penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas di tahun 2012 berjumlah 3.380,89 ribu, yang termasuk angkatan kerja adalah

2.213,51 ribu jiwa dan yang bekerja berjumlah 2.179,82 ribu jiwa. Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor utama bagi penduduk Sumatera Barat. Sebanyak 40,60 persen penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas berada di sektor pertanian.

Garis kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2012 tercatat sebesar 292.052 rupiah. Garis kemiskinan ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2011 garis kemiskinan adalah 276.000 rupiah.

Sementara itu jumlah penduduk miskin secara persentase cenderung makin berkurang, demikian juga dalam jumlah mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2009 terdapat 429,25 ribu penduduk miskin. Pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah 430,02 ribu orang dan di tahun 2011 meningkat menjadi 441,80 ribu orang, sedangkan pada tahun 2012 berkurang menjadi 397,86 ribu orang. Jumlah penduduk miskin terbesar pada periode 2008-2012 terdapat di tahun 2008, yaitu berjumlah 477,20 ribu jiwa.

DATA MENCERDASKAN BANGSA

**Publikasi ini Menyajikan tentang
Perkembangan beberapa indikator
ekonomi yang menggambarkan
kinerja perekonomian
Sumatera Barat
Pada tahun 2012**

Cakupan pembahasan meliputi :

- * Tinjauan Ekonomi
- * Perkembangan Harga
- * Ekspor dan Impor
- * Keuangan Daerah
- * Perbankan
- * Penduduk



BPS Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135
Telp. (0751) 442158 - 442160, Fax : (0751) 442161
E-mail : bps1300@bps.go.id
Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

